



PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

TAHUN 2021-2026



**DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
TAHUN 2023**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, yang sepantasnya diucapkan dalam mengawali pengantar ini, karena atas hidayah dan taufik-Nya sehingga Rancangan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar ini dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mengacu pada Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021–2026 Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ruang Lingkup pembahasan memuat visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang diharapkan mampu menyelaraskan visi dan misi dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

Dengan tersusunnya Rancangan Perubahan Renstra ini, diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan program dan kegiatan, selanjutnya akan dijabarkan dalam proses penyusunan rencana kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar setiap tahunnya (2021 - 2026).

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah berperan aktif dalam penyelesaian Rancangan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.

Demikian, dan terima kasih.

Benteng, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar



Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19730217 199803 2 011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa setiap Perangkat Daerah wajib membuat dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yaitu Rencana Strategis (Renstra) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dalam Pasal 11 ayat (3) mengemukakan bahwa rencana perangkat daerah terdiri atas Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Urgensi dan dasar penyusunan renstra juga berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan beberapa peraturan perundang undangan yang terkait.

Rencana strategis merupakan konsep yang digunakan dalam berbagai institusi untuk menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai secara komprehensif. Rencana strategis menjadi perangkat penting bagi institusi untuk menjelaskan apa yang hendak dicapai dan bagaimana mencapainya, membantu perangkat institusi untuk menemukan masalah yang dihadapi, identifikasi potensi dan

sumber daya, menyusun program serta kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dijalankan, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga di dukung oleh Kementerian Sosial melalui program dan Kegiatan yang dananya berasal Eselon 1 (Satu) terkait. Sasaran strategis Kemetrian Sosial anata lain: (1)meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan. (2) meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional. (3) mewujudkan penguatan tata kelola seta meningkatkan efektivitas birokrasi dan pelibatan publik.

Selain itu, dalam pelaksanaan pembangunan Kesejahteraan sosial sosial diKabupaten Kepulauan Selayar, Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar juga bekerja sama dan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melalui pemerintah daerah terkait yang menangani urusan sosial. Prioritas pembangunan kesejahteraan sosial dalam Renstra tahun 2021-2026 ini diantaranya adalah Peningkatan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2021–2026 merupakan rencana pembangunan dalam jangka 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahunan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial sebagai tahapan penyempurnaan dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada periode sebelumnya terutama dalam mewujudkan pembangunan Kesejahteraan Sosial di Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan program pembangunan kesejahteraan sosial diantaranya ditandai adanya peningkatan kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat, serta tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat. Untuk mencapai keberhasilan pembangunan yang dicitakan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama harus berperan aktif sesuai dengan tugas dan fungsinya masyarakat selaku subjek dan objek pembangunan. Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menciptakan suasana

yang kondusif, agar peran aktif semua pihak dapat terakomodir dalam pembangunan.

Pembangunan Kesejahteraan Sosial merupakan bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial individu, kelompok dan masyarakat. Kelompok masyarakat yang meliputi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial seperti: Lanjut usia terlantar, penyandang cacat, fakir miskin, anak terlantar, bencana alam / sosial dan tuna sosial merupakan bagian dari masyarakat yang tidak terpisahkan. Kelompok masyarakat ini perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki berbagai keterbatasan sehingga sering kali mereka tertinggal dalam proses pembangunan yang berakibat kurang dapat menikmati hasil pembangunan.

Penduduk yang termasuk dalam kelompok Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) cenderung mengalami peningkatan baik kualitas maupun intensitas. Dampak yang ditimbulkan sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara khusus. Untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi permasalahan tersebut, diperlukan data/informasi mengenai berbagai hal yang berkaitan secara akurat, terpercaya dan tepat waktu.

Untuk meningkatkan kinerja Dinas Sosial, Kabupaten Kepulauan Selayar, salah satu aspek yang sangat penting adalah penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA). Hal ini penting mengingat perencanaan pembangunan Dinas Sosial, dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas publik, Renstra menjadi sangat penting terutama dalam penentuan arah perencanaan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar. Oleh karena itu maka dianggap perlu menyusun Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 sebagai acuan dan arah kebijakan sekaligus sebagai dasar evaluasi dalam menilai kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.

1.2. Landasan Hukum

Berbagai landasan hukum yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial, meliputi :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
3. Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 69, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus disease 2019 (covid-19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Fakir Miskin. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3106);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 96, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 18); sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6323);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1312);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 251);
32. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018 - 2023;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 10 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 3 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penyusunan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2010 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 1);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 28);
36. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan 2022-2041 (Tambahan Lembar Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 322);

37. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);
38. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 62 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 126 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

- a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan oleh perangkat daerah yang akan dilaksanakan 5 (lima) tahun kedepan
dalam rangka mendorong pencapaian visi dan misi pemerintahan pemerintahan daerah kabupaten kepulauan selayar sebagaimana tertuang dalam RPJMD tahun 2021 – 2026; dan
- b. sebagai acuan dalam penyusunan renja perangkat daerah dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial untuk mewujudkan visi dan misi daerah yang telah disepakati dalam kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah untuk :

- a. tersedianya dokumen yang dapat digunakan oleh kepala perangkat daerah untuk mengarahkan dan mengalokasikan sumber daya dalam rangka pencapaian tujuan perangkat daerah;
- b. memudahkan pengukuran pencapaian kinerja perangkat daerah.

- c. memudahkan pengendalian kegiatan serta pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait monitoring dan evaluasi kegiatan baik secara internal maupun eksternal yang menjadi kerangka dasar bagi perangkat daerah dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan; dan
- d. Meningkatkan koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar bidang dalam perangkat daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka laporan ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Memuat Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan, serta sistematika penulisan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

Memuat gambaran umum pelayanan, sumber daya yang dimiliki dan kinerja, tantangan dan peluang pengembangan pelayanan serta struktur organisasi Dinas Sosial.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Memuat Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial mengidentifikasi dan membahas isu-isu strategi Dinas Sosial berdasarkan tugas dan fungsi yang dijalankan. Dan telaahan Visi, Misi Dan Program Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih, telaahan Renstra K/L Dan Renstra, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) serta Penentuan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Memuat rumusan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Memuat rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat Rencana Program dan Kegiatan sebagai penjabaran dari strategis kebijakan yang ditetapkan, serta Indikator Kinerja yang ditujukan pada Kelompok Sasaran dan pendanaan indikatif Dinas Sosial.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Sosial yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

BAB VIII PENUTUP

Menjelaskan penjabaran Renstra lebih lanjut dalam bentuk Renja Perangkat Daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS SOSIAL

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

Pembagian urusan pemerintahan diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana pembagian urusan konkruen di bidang sosial yang menjadi kewenangan provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintah bidang sosial. Dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan di bidang sosial terdapat urusan yang akan dilaksanakan daerah. Sebagaimana telah dijabarkan pula dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, penjabaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi jabatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar diatur melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 113);

Dinas Sosial mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan Umum dan Pembangunan dibidang Sosial

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar mempunyai susunan/ struktur organisasi dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Sosial yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. Dalam menyelenggarakan tugasnya Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang Sosial;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sosial;
- d. Pelaksanaan administrasi di bidang Sosial ; dan
- e. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas Kepala Dinas Sosial sebagai berikut :

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
7. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis rehabilitasi sosial;
8. menyelenggarakan dan merumuskan kebijakan teknis pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
9. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang sosial;
10. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang sosial;
11. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka

- pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
12. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 13. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 14. menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan kegiatan dan memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur dalam lingkup Dinas.

Untuk melaksanakan tugas, Sekretaris melaksanakan Fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data pelaporan, program dan anggaran pengembangan sumber daya manusia aparatur;
- b. Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- c. Pengelolaan penatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelola aset, dan dokumentasi;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
- e. Pelaksanaan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
- f. Pelaksanaan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
- g. Pelaksanaan perencanaan dan evaluasi kinerja dinas; dan
- h. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya;

Sedangkan uraian tugas sekretaris meliputi :

1. menyusun rencana kegiatan Sekretaris sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi, data, pelaporan, program, dan anggaran dinas ;
7. melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan, serta urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
8. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, rumah tangga, keamanan dan kebersihan, perlengkapan, pengelolaan aset, dan dokumentasi;
9. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian, pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi kinerja aparatur sipil negara lingkup Dinas;
10. melaksanakan penyusunan dan penetapan peraturan perundang-undangan bidang sosial;
11. melaksanakan penyelenggaraan peningkatan disiplin dan kapasitas sumber daya aparatur;
12. mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan produk hukum yang dilaksanakan oleh masing-masing bidang dalam lingkup dinas;
13. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
14. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
15. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Sekretaris dan memberikan saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
16. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sekretaris membawahi 2 (Dua) Sub Bagian antara lain :

- a. Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Hukum
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan

c. Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin meliputi:

1. menyusun rencana kegiatan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan sosial perorangan, keluarga dan kelembagaan masyarakat.

7. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan evaluasi pemberdayaan sosial kepahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan dan restorasi sosial;
8. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi pembinaan dan pemberdayaan kesejahteraan sosial terhadap masyarakat yang berada di daerah terpencil/ komunitas adat terpencil penanganan masalah sosial pada lingkungan masyarakat kumuh/keluarga berumah tak layak huni;
9. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantau dan evaluasi pengelolaan sumber dana bantuan sosial;
10. melaksanakan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial;
11. melaksanakan pembinaan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga;
12. pelaksanaan pembinaan organisasi sosial /lembaga swadaya masyarakat, wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat dan lembaga kesejahteraan sosial;
13. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi penanganan fakir miskin/keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir dan pulau-pulau kecil;
14. melaksanakan pendataan dan pengolahan data fakir miskin dalam kabupaten;
15. menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
16. mengkoordinasikan kebijakan dalam upaya pembinaan dan pemberdayaan fakir miskin/keluarga miskin;
17. mempersiapkan bahan pembinaan dan pengendalian usaha-usaha kesejahteraan sosial fakir miskin/keluarga miskin;
18. melakukan pendataan dan pengelolaan data fakir miskin;
19. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan identifikasi, pemetaan dan penguatan kapasitas;
20. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi, pelaporan pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaan terhadap fakir miskin/ keluarga miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil.

21. melakukan kebijakan, pelayanan sosial terhadap fakir miskin pedesaan, perkotaan, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
22. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pendampingan;
23. melaksanakan pemberian bantuan gratis beras miskin bagi masyarakat miskin;
24. melakukan pelayanan administrasi terhadap keluarga miskin yang memerlukan legalitas surat keterangan tidak mampu;
25. melakukan koordinasi dalam upaya peningkatan kesejahteraan sosial wanita dan rawan sosial ekonomi masyarakat di lingkungan kumuh/keluarga berumah tidak layak huni dan komunitas adat terpencil;
26. melakukan pembinaan dan pemberdayaan sosial terhadap keluarga rentan, keluarga bermasalah sosial psikologis dan wanita rawan sosial ekonomi;
27. melakukan pembinaan dan pemberdayaan bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan penanganan masalah sosial masyarakat yang berada di lingkungan kumuh/keluarga berumah tidak layak huni;
28. melakukan kebijakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pemberdayaan masyarakat yang berada di daerah terpencil/komunitas adat terpencil dan bantuan stimulan;
29. melakukan kebijakan bimbingan teknis dan pemantauan serta evaluasi pekerja sosial dan pekerja sosial masyarakat, tenaga kesejahteraan sosial dan relawan sosial lainnya;
30. mengoordinasikan kebijakan pengendalian usaha-usaha dalam upaya pelestarian nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan, kejuangan, kesetiakawanan sosial serta restorasi sosial;
31. mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan usaha-usaha pemberdayaan kelembagaan organisasi sosial/lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kesejahteraan sosial dan karang taruna;
32. melakukan pembinaan terhadap lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga dan unit peduli keluarga;

33. melakukan pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten;
34. mengumpulkan data potensi sumber kesejahteraan yang meliputi organisasi sosial, karang taruna, wanita pemimpin kesejahteraan sosial, dunia usaha yang melakukan usaha kesejahteraan sosial dan wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat;
35. melakukan pembinaan penjaga taman makam pahlawan;
36. memfasilitasi peringatan hari pahlawan dan hari kesetiakawanan sosial berbasis masyarakat;
37. mengumpulkan data pahlawan perintis kemerdekaan, veteran dan keluarganya;
38. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
39. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi ;
40. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan;
41. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin serta memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
42. melaksanakan Tugas kedinasan lain yang di perintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin membawahi 3 (tiga) Seksi antara lain :

1. Seksi Penguatan Kapasitas Sosial
2. Seksi Penataan Lingkungan Sosial
3. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial

4. Bidang Rehabilitasi Sosial

Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang rehabilitasi sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang rehabilitasi sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintakan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Rehabilitasi Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Rehabilitasi Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. melaksanakan kebijakan teknis fasilitasi, koordinasi, pemantauan pelayanan dan rehabilitasi terhadap anak, lanjut usia, penyandang cacat, tuna sosial dan korban perdagangan orang;
- g. melaksanakan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar, lanjut usia potensial, penyandang cacat dan tuna sosial;
- h. melaksanakan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan;
- i. melaksanakan pemeliharaan anak-anak terlantar;
- j. melaksanakan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- k. melaksanakan pelayanan dan penanganan orang dengan gangguan jiwa;
- l. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* untuk dikoordinasikan dan melaporkan kepada Pemerintah Daerah;

- m. melaksanakan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan HIV/ AIDS untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- n. melaksanakan proses pengangkatan anak (adopsi anak);
- o. melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial;
- p. mengoordinasikan kebijakan dalam upaya pelayanan dan rehabilitasi anak balita terlantar, anak jalanan, anak/remaja terlantar, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- q. melakukan usaha-usaha pelayanan dan rehabilitasi anak balita terlantar, anak jalanan, anak/remaja terlantar, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- r. mengoordinasikan kebijakan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia;
- s. melakukan usaha-usaha pelayanan lanjut usia;
- t. melakukan pelayanan, rehabilitasi penyantunan dan perlindungan sosial terhadap anak balita terlantar, anak jalanan, anak/remaja terlantar, anak dengan kecacatan, anak berhadapan dengan hukum, anak yang memerlukan perlindungan khusus;
- u. melakukan perlindungan dan advokasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum;
- v. melakukan pengendalian terhadap penyantunan anak melalui tempat penitipan anak;
- w. melakukan pendidikan, pelatihan keterampilan bagi anak/remaja terlantar, anak nakal dan anak cacat;
- x. melakukan pemberdayaan terhadap anak/remaja terlantar;
- y. melakukan usaha pemberdayaan terhadap lanjut usia potensial;
- z. melakukan pelayanan sosial, santunan dan penyediaan aksesibilitas bagi lanjut usia terlantar;
- aa. melakukan pemberian tunjangan hidup bagi anak yatim piatu;
- bb. melakukan pemberian tunjangan hidup bagi lanjut usia/jompo terlantar (non potensial);
- cc. menyusun rencana pemberdayaan penyandang cacat (penyandang disabilitas);

- dd. melakukan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial penyandang cacat (penyandang disabilitas) fisik, sensorik, mental dan intelektual;
- ee. melakukan pemberdayaan tunjangan hidup bagi penyandang (penyandang disabilitas);
- ff. melakukan pemberian tunjangan hidup bagi penyandang disabilitas fisik dan mental non potensial;
- gg. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial gelandangan, pengemis, warga binaan dan lembaga pemasyarakatan serta korban perdagangan orang dan korban tindak kekerasan di luar panti dan/ atau lembaga;
- hh. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis, serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan rehabilitasi sosial eks tuna susila di luar panti dan/ atau lembaga;
- ii. melakukan kebijakan, pelaksanaan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kelembagaan rehabilitasi sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di luar panti dan/ atau lembaga;
- jj. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial orang dengan *Human Immunodeficiency Virus (HIV)/acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)* untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada pemerintah Daerah;
- kk. melakukan pengelolaan data pelayanan sosial korban penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif lainnya (NAPZA) untuk dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Pemerintah Daerah;
- ll. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial;
- mm. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- nn. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- oo. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- pp. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial membawahi 2 (dua) kepala Seksi antara lain :

1. Seksi Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak dan Lanjut Usia
2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Penyandang Cacat dan Tuna Sosial

5. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam merumuskan, mengordinasikan dan melaksanakan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial.

Untuk melaksanakan tugas, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial melaksanakan Fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis perlindungan dan jaminan sosial;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- d. pelaksanaan administrasi di bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
- e. pelaksanaan Fungsi lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. menyusun rencana kegiatan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial sebagai pedoman dalam pelaksanaan Tugas;
- b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan Tugas;
- c. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan Tugas dalam lingkungan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan Tugas;
- d. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
- e. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;

- f. melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan penanggulangan korban bencana alam, bencana sosial dan jaminan sosial keluarga;
- g. melaksanakan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan;
- h. melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pengendalian kegiatan;
jaminan Sosial terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlantar), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sanga terlantar);
- i. melaksanakan norma, standar, prosedur, kriteria bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- j. melakukan kebijakan dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana, pemulihan dan penguatan sosial;
- k. melakukan kebijakan, dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan logistik;
- l. melakukan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan trauma korban bencana alam dan sosial;
- m. melakukan pelayanan dan penanggulangan bagi korban bencana alam dan sosial;
- n. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
- o. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan, pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan, dan taruna siaga bencana;
- p. melakukan pemulangan warga negaramigran korban tindak kekerasan/pekerjamigran bermasalah sosial;
- q. melakukan perlindungan terhadap pekerja migran korban bencana tindak kekerasan/pekerja migran bermasalah sosial;
- r. mengoordinasikan kebijakan dalam upaya pelaksanaan jaminan sosial keluarga;

- s. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi, verifikasi dan validasi terminasi serta kemitraan jaminan sosial keluarga;
- t. melakukan kebijakan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
- u. memfasilitasi program keluarga harapan;
- v. melakukan pelayanan jaminan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial yang sangat rentan (non potensial) yang membutuhkan bantuan permanen antara lain lansia terlantar (kategori sangat terlarang), cacat ganda (kategori cacat sangat berat), anak terlantar (kategori sangat terlarang);
- w. menyusun kebijakan teknis pemberian ijin pengumpulan yang dan barang;
- x. memfasilitasi kajian rekomendasi penerbitan izin pengumpulan sumbangan dalam daerah;
- y. mengoordinasikan kebijakan dalam upaya perlindungan dan pemulihan sosial terhadap terhadap korban bencana alam dan sosial;
- z. mengoordinasikan dan melaksanakan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis bidang perlindungan dan jaminan sosial;
- aa. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi;
- bb. menilai kinerja pegawai aparatur sipil negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- cc. menyusun laporan pelaksanaan Tugas Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dan memberi saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- dd. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

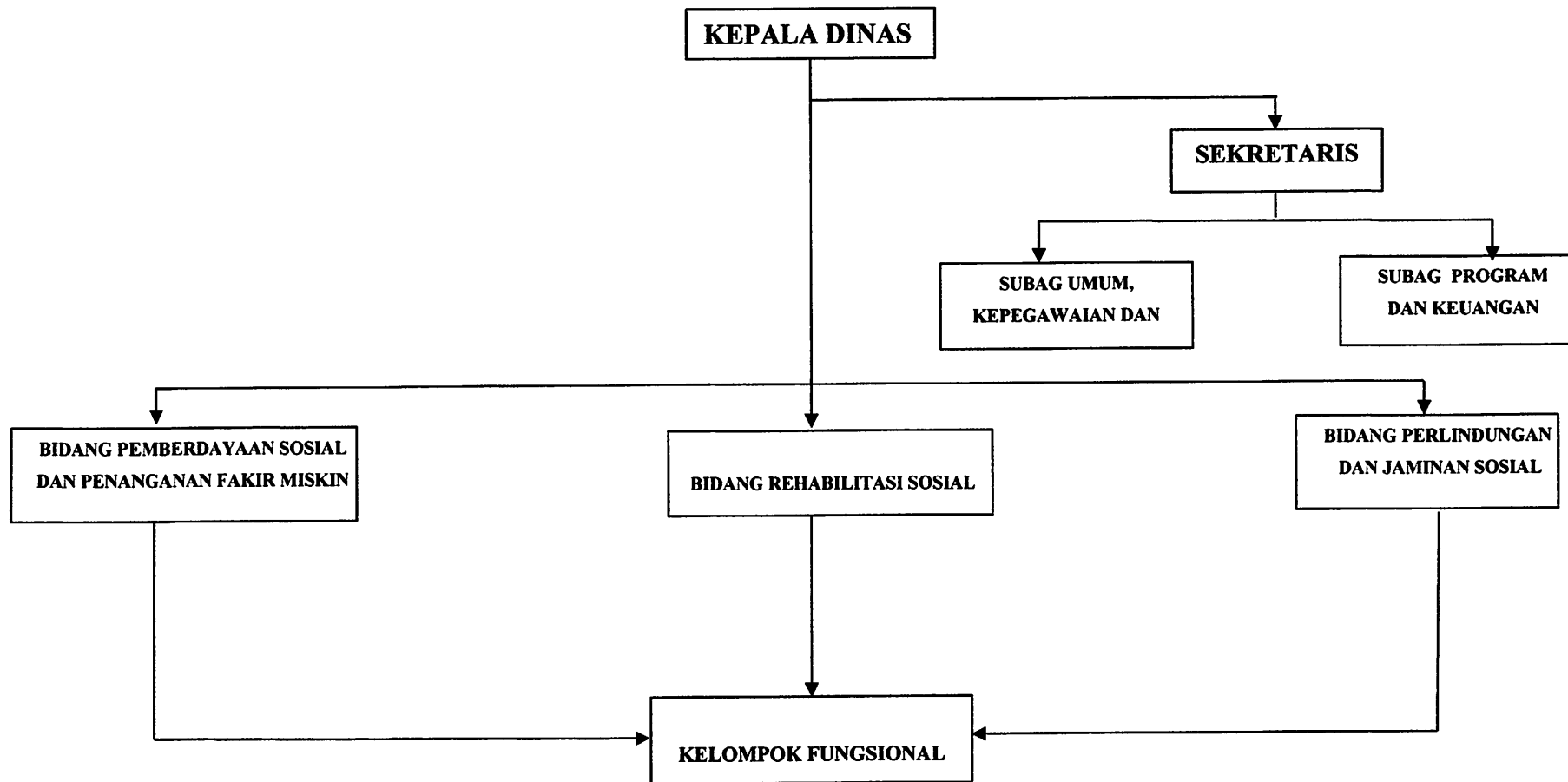
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial membawahi 2 (Dua) Seksi antara lain :

1. Seksi Perlindungan Korban Bencana Alam dan Penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan.
2. Seksi Jaminan Sosial Keluarga

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Pada Dinas Sosial dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai Tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tugas fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Gambar 2.1
STRUKTUR ORGANISISASI
DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



2.2. Sumber Daya Dinas Sosial

i. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar per 31 Desember 2022 mempunyai sumber daya aparatur sebanyak 80 (Delapan Puluh) orang yang terdiri dari PNS sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) orang, PTT sebanyak 58 (Lima Puluh Delapan) orang dan Tenaga Sukarela sebanyak 1 (Satu) orang, dengan mengklarifikasikan menjadi beberapa kelompok sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Aparatur Berdasarkan Pangkat

No.	Pangkat	Jumlah
1	Eselon II	1 orang
2	Eselon III	4 orang
3	Eselon IV	2 orang
4	Fungsional	6 Orang

Didalam Dinas Sosial memiliki komposisi aparatur seperti apa yang telah digambarkan di atas adalah tidak memiliki aparatur yang memiliki Eselon II dan Eselon III diduduki oleh seorang Kepala Dinas, Sekretaris dan Kepala Bidang, sedangkan Eselon IV di duduki oleh Kepala Sub Bagian dan Fungsional di duduki oleh Kepala Seksi. Selanjutnya adalah penggolongan aparatur berdasarkan golongan yang diuraikan melalui table berikut :

Tabel 2.2
Jumlah Aparatur Berdasarkan Golongan/Ruang

No	Golongan/Ruang	Jumlah
1	I/a	- orang
2	I/b	- orang
2	I/b	- orang
3	I/c	- orang
4	I/d	- orang
5	II/a	- orang
6	II/b	- orang
7	II/c	- orang

8	II/d	1 orang
9	III/a	5 orang
10	III/b	3 orang
11	III/c	5 orang
12	III/d	1 orang
13	IV/a	2 orang
14	IV/b	2 orang
15	IV/c	- orang
16	Kontrak Pusat	3 orang
17	Kontrak Bupati	76 orang
18	Sukarela	1 orang

Berdasarkan tabel diatas dengan sangat jelas terlihat golongan terendah aparatur yang dimiliki oleh Dinas Sosial adalah golongan II/d, dan yang tertinggi adalah golongan IV/b yang berjumlah 1 orang. Sedangkan penggolongan berdasarkan pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3

Jumlah Aparatur Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

	Jenjang Pendidikan	Jumlah
1	Magister S2	4 orang
2	Sarjana S1	13 orang
3	Diploma III	1 orang
4	SMA/Sederajat	4 orang
5	SMP/Sederajat	- Orang

Dari komposisi aparatur tersebut terlihat bahwa sekolah terendah aparatur Dinas Sosial adalah SMA/Sederajat, sehingga dalam proses perjalanannya perlu melakukan beberapa penyesuaian agar tidak mengurangi kinerja. Dan diimbangi oleh aparatur dengan pendidikan yang lebih tinggi dan mengasah skill melalui berbagai pelatihan.

Tabel 2.4
Data Pendamping, Pekerja Sosial dan Tagana Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	KECAMATAN	TKSK		PKH		TAGANA	
		L	P	L	P	L	P
1	BENTENG	1	-	3	1	1	1
2	BONTOHARU	-	1	-	2	1	1
3	BONTOSIKUYU	-	1	1	2	1	1
4	BONTOMATENE	1	-	1	1	1	1
5	BONTOMANAI	1	-	-	2	1	1
6	BUKI	1	-	-	1	1	1
7	PASIMASUNGGU	1	-	2	1	1	1
8	PASIMASUNGGU TIMUR	1	-	3	1	1	1
9	PASILAMBENA	1	-	1	2	1	1
10	PASIMARANNU	1	-	2		1	1
11	TAKABONERATE	-	1	4		1	1
JUMLAH		8	3	17	13	11	11

Dari komposisi data tersebut diatas Jumlah TKSK sebanyak 11 Orang, Pendamping PKH sebanyak 30 Orang dan Jumlah Tagana sebanyak 22 orang. pendamping ini bertujuan untuk memberikan informasi dan bimbingan, serta memfasilitasi dan membantu mengatasi masalah yang dihadapi penerima manfaat terkait dengan pendidikan anak, kesehatan, ekonomi dan sosial.

ii. Asset/Modal

Asset/Modal yang dimiliki Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar, sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2.5
Asset/Modal

Nama Barang	Harga Perolehan
a. Asset tetap tanah	1.194.100.000
b. Peralatan dan Mesin	1.684.374.250

c. Gedung dan Bangunan	1.715.825.000
d. Jalan, Jaringan dan Irigasi	99.000.000
e. Asset Lainnya	151.907.500

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Berdasarkan Renstra Dinas Sosial 2016 – 2021, maka selama Tahun 2017 – 2020 terdapat beberapa program pembangunan di bidang sosial yang telah dilaksanakan sebagai berikut :

1) Program pelayanan administrasi perkantoran.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Terselenggaranya pelayanan administrasi perkantoran secara efektif.
- c. Arah Kebijakan : Peningkatan profesionalisme aparatur pemerintah.
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Tersedianya jasa surat menyurat
 - Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Tersedianya jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional (tersedianya STNK dan SIM)
 - Tersedianya jasa administrasi keuangan
 - Tersedianya jasa kebersihan kantor
 - Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja
 - Tersedianya alat tulis kantor
 - Tersedianya barang cetakan dan penggandaan
 - Tersedianya komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor
 - Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor
 - Tersedianya peralatan rumah tangga
 - Tersedianya makanan dan minuman pegawai
 - Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
 - Tersedianya laporan hasil rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah

2) Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Tersedia dan terpeliharanya sarana dan prasarana pelayanan.
- c. Arah Kebijakan: Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Tersedianya kendaraan dinas/ operasional roda dua.

- Tersedianya perlengkapan gedung kantor.
- Tersedianya peralatan gedung kantor.
- Tersedianya mebeleur.
- Terpeliharanya gedung kantor.
- Terpeliharanya mobil jabatan/ dinas.
- Terpeliharanya kendaraan dinas/ operasional
- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor.
- Terpeliharanya peralatan gedung kantor.
- Terpeliharanya mebeleur
- Terehabilitasinya gedung kantor.

3) Program peningkatan pengembangan sistim pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik dan bersih.
- b. Sasaran : Tersedianya pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- c. Arah Kebijakan: Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Terusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Iinstansi Pemerintah
 - Tersusunnya laporan keuangan
 - Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Perkembangan Bantuan
 - Tersusunnya Laporan Standar Pelayanan Minimal
 - Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Perkantoran

4) Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- a. Tujuan : Mewujudkan pelayanan pemerintahan yang baik yang baik dan bersih
- b. Sasaran : Meningkatnya sumber daya aparatur
- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan sumber daya aparatur
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Meningkatnya jumlah Pengawai yang mengikuti diklat

5) Program pemberdayaan fakir miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial (fakir miskin 4.995 KK, keluarga berumah tak layak huni 1.790 KK, wanita rawan sosial ekonomi 92 orang, keluarga rentan 80 KK dan KAT 100 KK)
- c. Arah Kebijakan: Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- **Fakir miskin** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 4.709 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 94,27 %.
 - **Keluarga berumah tak layak huni** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 1.286 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 7,18 %.
 - **Wanita rawan sosial ekonomi** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 92 orang.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.
 - **Keluarga rentan** yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 80 KK.
Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.

6) Program pelayanan dan rehabilitas kesejahteraan sosial.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Meningkatnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial serta sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial.

- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan kepedulian terhadap lanjut usia dan korban bencana, pencegahan dan pengendalian muncul dan berkembang permasalahan sosial serta pengembangan kapasitas lembaga pelayanan pemerintah
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Lanjut usia yang tertangani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 3.458 orang.
 - Korban bencana yang terlayani selama Tahun 2017 – 2020 sebanyak 580 KK.
 - Tersedianya data PMKS dan PSKS.
 - Terwujudnya pemberdayaan KAT.

7) Program pembinaan anak terlantar.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial anak terlantar 518 orang.
- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan kepedulian terhadap anak terlantar melalui pembinaan dan pemberian bantuan
- d. Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
 - Anak terlantar yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 495 orang.

Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 95,55 %.

8) Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma.

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial penyandang cacat 219 orang.
- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan kepedulian terhadap penyandang cacat melalui pembinaan dan pemberian bantuan.

- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Penyandang cacat yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 207 orang
- Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 94,52 %.

9) Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (Eks narapidana, PSK, Narkoba dan penyakit sosial lainnya).

- a. Tujuan : Meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penyandang masalah kesejahteraan sosial.
- b. Sasaran : Tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial eks narapidana 59 orang.
- c. Arah Kebijakan: Meningkatkan kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK. Narkoba dan penyakit sosial lainnya).
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Eks narapidana yang tertangani Tahun 2017 – 2020 sebanyak 59 orang.
- Jika dibandingkan dengan sasaran yang ingin dicapai selama 2017 – 2020, maka target mencapai 100 %.

10) Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial.

- a. Tujuan : Meningkatkan peran aktif sumber daya kesejahteraan sosial dalam usaha peningkatan kesejahteraan sosial serta melestarikan dan meningkatkan pemahaman dan penghayatan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat.
- b. Sasaran : Meningkatnya partisipasi/ peran aktif sumber daya kesejahteraan sosial dan masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial serta tertanamnya nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial dalam kehidupan masyarakat

- c. Arah Kebijakan : Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya pelestarian, penghayatan, penerusan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.
- d Hasil yang telah dicapai selama 2017 – 2020 antara lain :
- Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan.
 - Karang taruna memperoleh bantuan peralatan keterampilan dan kelembagaan sebanyak 5 karang taruna.
 - Janda/keluarga pahlawan memperoleh bantuan sebanyak 27 orang dan di berikan sebanyak 2 (dua) kali dalam setahun.
 - Pengurus/ anggota karang taruna yang mampu memenuhi usaha karang taruna.

Dari uraian diatas dapat dilihat adanya kesenjangan dalam pelayanan pada bidang sosial, penyandang masalah kesejahteraan sosial yang lebih banyak tertangani adalah fakir miskin sebanyak 4.709 KK (94,27 %), keluarga berumah tidak layak huni 1.286 KK (7.18%), Wanita rawan sosial ekonomi 92 orang (100%), keluarga rentan 80 KK (100%), KAT 20 KK.

Dengan membandingkan antara target yang telah dicapai dengan sasaran yang ingin dicapai sampai Tahun 2020, maka pelayanan yang mencapai target adalah tertanganinya penyandang masalah kesejahteraan sosial fakir miskin yaitu mencapai 78.35 % tetapi bila dibandingkan dengan data PMKS yang ada maka target hanya mencapai 28,57 %.

Pada umumnya faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya pelayanan adalah dukungan dana yang belum memadai. Selain kurangnya dana juga yang turut mempengaruhi adalah kurangnya kualitas dan kuantitas SDM aparatur sehingga terkadang pegawai melakukan tugas rangkap di seksi lain.

Berikut matriks Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2017 sampai dengan Tahun 2020 :

Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

No.	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Sosial	Target SPM					Target IKK					Target Indikator Lainnya					Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial						96.71	96.71	97.21	111	11.81											12.52	19.4	22.53	47.73	98.7	0.12	0.20	0.43	0.50	8.35
2	Persentase PMKS yang Tertangani						70	70	70	70	70											0.32	0.55	6.55	6.99	11.81	0.45	0.78	0.65	0.99	0.16
3	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan	100	100	100	100	100																0.32	90.8	22.55	17.07	16.36	0.32	90.8	22.55	17.07	16.36
4	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap cepat	100	100	100	100	100																3.45	3.27	31.7	3.18	82.9	3.45	3.27	31.7	3.18	82.9
5	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap cepat darurat	100	100	100	100	100																3.45	3.27	31.7	3.18	82.9	0.04	0.40	0.37	0.03	0.97
6	Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia potensial yang telah menerima jaminan sosial	100	100	100	100	100																16.9	14.6	18.4	16.63	12.63	16.9	14.6	18.4	16.63	12.63
7	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	90	90	90	90	90																23.3	14.0	28.2	28.4	33.4	0.25	0.15	0.31	0.31	0.37

Benteng, 5 April 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar
Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar

M. Samsudin, S.Sos., M.A.P.
Pangkat: Pembina Tk. I
Nip. 19730217 199803 2 011

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial.

Dalam rangka membuat formulasi Rencana Strategis yang mencerminkan perwujudan pandangan ideal dan hal-hal yang akan dicapai dimasa yang akan datang, maka perlu penguasaan informasi tentang masalah-masalah dalam lingkungan strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar melalui analisis lingkungan internal dan eksternal serta melakukan penyimpulan (asumsi).

Tujuan yang hendak dicapai dalam analisis tersebut adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta memahami peluang dan tantangan sehingga dapat mengantisipasi perubahan-perubahan dimasa datang.

2.4.1. Analisis Lingkungan Internal.

Untuk melaksanakan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar serta merumuskan berbagai kebijaksanaan dan program strategis, maka dilakukan analisis terhadap kondisi lingkungan internal dan eksternal dengan metode analisis SWOT sehingga diketahui kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi yang selanjutnya melahirkan strategi dasar pembangunan.

Analisis mengenai lingkungan internal dapat dilihat pada matriks dibawah ini

Tabel 2.7
MATRIKS ALI

FAKTOR INTERNAL	BOBO	RATIN	SKOR (B X R)	PRIORIT
KEKUATAN (STRENGHT)				
1. Kelembagaan/ kedudukan, tugas Pokok dan fungsi organisasi yang cukup jelas.	22	4	88	I
2. Adanya semangat dan motivasi kerja pegawai.	21	4	84	II
3. Adanya kerjasama yang baik diantara pegawai dalam pelaksanaan tugas	19	3	57	IV
4. Kebijakan/ perundang- undangan yang mendukung.	18	2	36	V
JUMLAH	100		325	
KELEMAHAN (WEAKNES)				

1. Kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum memadai.	23	4	92	I
1. Sarana dan prasarana belum memadai.	22	3	66	II
2. Penempatan pegawai yang tidak tepat.	21	3	63	III
3. Data yang tersedia belum akurat	20	2	40	IV
4. Jangkauan pelayanan belum merata	14	1	14	V
JUMLAH	100		275	

2.4.2. Analisis Lingkungan Eksternal

Tabel 2.8
Matrik ALE

FAKTOR EKSTERNAL	BOBO	RATIN	SKOR (B X R)	PRIORIT
PELUANG (OPPORTUNITIES)				
1. Adanya institusi/ lembaga yang dapat membantu dalam pemanfaatan/ pengelolaan potensi dan peningkatan SDM.	20	3	60	III
2. Adanya dukungan dana Pemerintah Untuk pembangunan dibidang Sosial	21	3	63	II
	22	4	88	I
3. Peran serta masyarakat dalam pembangunan.	19	2	36	IV
4. Letak geografis yang strategis	18	1	18	V
JUMLAH	100		265	
TANTANGAN (TREATH)				
1. Banyaknya jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pengangguran.	22	3	66	II
	23	4	92	I
2. Rendahnya kualitas SDM masyarakat/pola hidup konsumtif	20	2	40	IV
3. Modernisasi, individualisasi semakin berkembang.	14	1	14	V
4. Semakin berkembangnya jumlah penduduk.				
JUMLAH	100		275	

c. Asumsi.

Dengan melihat matriks Analisis Lingkungan Internal (ALI) dan Analisis Lingkungan Eksternal (ALE), maka dapat ditarik rumusan asumsi sebagai berikut :

- Yang menjadi kekuatan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah : kelembagaan/ kedudukan, tugas pokok dan fungsi organisasi yang cukup jelas, adanya semangat dan motivasi kerja pegawai
- Sedangkan yang menjadi kelemahannya adalah : kualitas dan kuantitas SDM aparatur belum memadai, sarana dan prasarana belum memadai dan penempatan pegawai yang tidak tepat.
- Namun ada beberapa peluang untuk dimanfaatkan yakni : adanya dukungan dana pemerintah untuk pembangunan dibidang sosial, dan adanya institusi/ lembaga yang dapat membantu dalam pemanfaatan/ pengelolaan potensi sumber kesejahteraan sosial dan peningkatan sumber daya manusia.
- Tantangannya adalah : rendahnya kualitas SDM pengelola sumber kesejahteraan sosial dan banyaknya jumlah Pemerlu Pelayanan kesejahteraan sosial.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS SOSIAL

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Sosial.

Isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Sosial adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu-isu strategis bagi Dinas Sosial diperoleh baik dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Sosial dimasa lima tahun mendatang.

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi Dinas Sosial dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi selama ini adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/ panti sosial yang digunakan sebagai penampungan sementara bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).	Belum adanya sarana rumah singgah/ panti sosial / penampungan sementara yang digunakan untuk penanganan orang terlantar serta anak yang berhadapan hukum	Belum adanya sarana rumah singgah/ panti sosial / penampungan sementara yang digunakan untuk penanganan orang terlantar serta anak yang berhadapan hukum

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
2	Sinkronisasi Data Terpadu PPKS yang belum optimal	Belum optimalnya pepadanan data antara data DTKS dengan Data DisCapil dan Kependudukan	Operator desa belum maksimal dalam mengupdate data
3	Belum adanya regulasi yang menyatakan bahwa lokasi tersebut adalah lokasi Komunitas Adat Terpencil (KAT).	Lokasi KAT Belum ditetapkan dengan Regulasi	Penanganan KAT belum Optimal karena lokasi masih berpindah-pindah
4	Kondisi dan luasan Taman Makan Pahlawan (TMP) yang tidak sesuai standar	Luar lahan TMP masih sangat kecil tidak memenuhi standar	Perlu menambah luasan TMP
5	Gudang logistik belum tersedia	Logistik tidak dikelola dengan maksimal	Tidak adanya tempat atau ruangan yang di gunakan untuk menyimpan logistik
6	Terbatasnya jumlah Sumber Daya Manusia	Keterbatasan SDM perencanaan, Pekerja Sosial, Pendamping Sosial yang handal dan bersertifikat.	a. Kuota CPNS/SDM terbatas b. SDM jarang mengikuti Pendidikan dan pelatihan

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

a. Visi

Rencana Pembangunan Jangka Menengah adalah desain pembangunan yang dirancang sebagai bagian dari pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang. Penyusunan rencana pembangunan tersebut disusun berdasarkan beberapa dokumen penting sebagai pedoman dan pertimbangan analisis konteks yang berkembang.

Untuk kepentingan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021- 2026, beberapa dokumen penting menjadi acuan, antara lain adalah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Nasional Tahun 2019-2024, Rencana Tata Ruang Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2013-2023 dan visi, misi dan

program kepala daerah terpilih, serta RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini menandakan bahwa Rencana 55 Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah bagian dari tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Visi adalah rumusan umum mengenai cita-cita yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Visi yang telah dirumuskan, yang diambil dari visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, periode 2021-2026 adalah:

“KEPULAUAN SELAYAR SEBAGAI BANDAR MARITIM KAWASAN TIMUR INDONESIA”

Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu :

- a. *Bandar Maritim* adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri; dan
- b. *Kawasan Timur Indonesia* menunjukkan bahwa berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Penjelasan visi RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar 2021 – 2026 :

“Bandar Maritim” mengandung pengertian seluruh kegiatan yang berhubungan dengan kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, jasa, dan industri.

“Kawasan Timur Indonesia” berada pada Kawasan Timur Indonesia dengan jaringan (hubungan) perdagangan barang/jasa, industri, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian Timur, Maluku, dan Maluku Utara.

Visi “Bandar Maritim” merupakan gambaran kondisi daerah yang diinginkan pada tahun 2026, ditandai dengan keluaran berikut ini :

- a. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Pusat Distribusi Logistik”

- b. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata”
- c. Terbentuknya dasar pembangunan “Kawasan Industri Perikanan Terpadu”

Dengan terwujudnya Visi “Bandar Maritim” pada tahun 2026, akan memberi dampak pada terbangunnya daerah dengan indikator capaian dimulai pada tahun 2026, sebagai berikut :

- a. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;
- b. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan hidup yang terjamin;
- c. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional dari komoditas perikanan, serta menjadi penyedia komoditas ekspor (perikanan dan non perikanan); dan
- d. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing daerah.

2. Misi

Dalam upaya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan, maka ada 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar Periode 2021 – 2026, yaitu :

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang terlihat dari birokrasi yang bersih, akuntabel, transparan, birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang memiliki pelayanan publik yang berkualitas.

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan 57 pembangunan berbasis desa yang berkelanjutan dengan memperhatikan capaian klasifikasi dan kualifikasi desa menuju, serta segenap upaya peningkatan ekonomi berbasis desa.

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah tingkat kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Kepulauan Selayar yang dibangun agar mempunyai derajat kualitas hidup yang tinggi yang

diukur dari peningkatan IPM dan mempunyai daya saing yang baik.

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pengembangan motor penggerak ekonomi masyarakat akan difokuskan pada pemanfaatan potensi kelautan (termasuk jasa kelautan dan pariwisata bahari) dan potensi perikanan dengan segenap keunggulan yang dimiliki.

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan sosial dan Keagamaan.

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah memastikan terhubungnya segala aktifitas kehidupan sosial masyarakat dengan fundamental keagamaan sebagai landasan dan arah hidup masyarakat sebagai khalifah.

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pernyataan misi ini mengandung makna adalah pembangunan yang dilakukan melalui pendekatan pembangunan yang berkelanjutan dengan memperhatikan daya dukung dan ramah terhadap lingkungan, serta upaya pemulihan lingkungan yang telah terdegradasi.

Tabel 3.2

Hubungan Sasaran RPJMD 2021 – 2026 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR terhadap RENSTRA 2021 – 2026 DINAS SOSIAL KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Sasaran Kinerja Kepala Daerah Terpilih	Capaian Sasaran Kepala Daerah Terpilih	Sasaran Renstra Dinas Sosial	Capaian Sasaran Renstra Dinas Sosial
Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan (S-1)	Indeks Kepuasan Masyarakat= 85,00%	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap masyarakat	Indeks kepuasan layanan = 100%
	Nilai SAKIP Daerah = B	Meningkatnya Nilai SAKIP Dinas	Nilai Sakip OPD = B
	Opini BPK= WTP	Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah	Persentase peningkatan ketertiban administrasi pengelolaan keuangan dan asset daerah = 100%

Meningkatnya kapasitas dan fasilitas perdesaan (S-2)	Indeks Desa Membangun	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
			Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)

3.3. Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Kementerian Sosial sebagai kementerian yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana strategis Dinas Sosial antara lain Kementerian Sosial,

3.3.1. Telaahan Renstra kementerian Sosial

Untuk melaksanakan pembangunan kesejahteraan sosial di Indonesia Kementerian Sosial telah menyusun Renstra Tahun 2020 – 2024 dengan sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut:

- a. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.
- b. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang professional.
- c. Mewujudkan penguatan tata kelola serta meningkatkan efektivitas birokrasi dan melibatkan publik.

Yang kemudian diwujudkan menjadi program dan kegiatan agar sasaran-sasaran tersebut dapat tercapai. Telaahan mengenai Renstra Kementerian Sosial Sejalan dengan itu Bidang Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar telah menyusun program kerja 3 (Tiga) program prioritas beserta kegiatannya untuk mendukung program kerja yang ada di pemerintah pusat dan ikut serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial seperti termuat dalam Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2016-2021.

Melalui kebijakan otonomi daerah, pemerintah memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah, khususnya daerah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan pembangunan dan mengurus rumah tangganya sendiri. Kenyataan menunjukkan bahwa pemberian otonomi tersebut tidak sepenuhnya berjalan mulus, karena masih sering ditemukan adanya eksekusi negatif yang mengakibatkan terjadinya hambatan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial. Perubahan ini hendaknya disikapi secara arif, bijaksana, dan diarahkan pada terwujudnya pemahaman dan komitmen pelaku pembangunan kesejahteraan sosial di setiap daerah kabupaten.

3.3.2. Telaahan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan

Berdasarkan Misi Gubernur Sulawesi Selatan periode 2018 - 2023 yang terkait dengan urusan Sosial yaitu Misi 1 Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan Inovatif, **Tujuan I RPJMD Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan, Tujuan Rencana Strategis** Dinas Sosial yaitu :

Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

- Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS, LK3, WKSMB, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Untuk menjabarkan strategi yang telah ditetapkan sesuai dengan agenda Pemerintah Daerah, maka diperlukan arah kebijakan untuk dapat dijadikan pedoman bagi Dinas Sosial

Provinsi Sulawesi Selatan dalam melaksanakan pembangunan dibidang kesejahteraan sosial dan sebagai dasar untuk menetapkan program serta indikasi kegiatannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas hidup bagi PPKS terhadap pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik dan jaminan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial bagi Permerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial serta peningkatan pemberdayaan kelompok rentan sosial lainnya.
3. Meningkatkan prakarsa dan peran aktif masyarakat mampu, dunia usaha, perguruan tinggi, dan ORSOS/LSM dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial secara terpadu dalam berkelanjutan dalam mendayagunakan sumber kesejahteraan sosial.

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan tujuan, sasaran, strategi serta visi dan misi Provinsi Sulawesi Selatan 2018 - 2023

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan RTRW

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, telah ditetapkan 3 (tiga) kawasan Strategis Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang lokasinya berada dalam wilayah administratif kabupaten Kepulauan Selayar, yaitu :

1. Kawasan Pengembangan Pusat Distribusi Kebutuhan Bahan Pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 – 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung utara Pulau Selayar; dan
3. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan

2. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan atau teknologi;
3. Kawasan Wisata Bahari Takabonerate yang merupakan KSP dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Selanjutnya, berdasarkan potensi daerah dan posisi geografis, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar pada Perda RTRW Nomor 5 tahun 2012 telah ditetapkan pengembangan kawasan sebagai berikut :

1. Pengembangan kawasan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok Kawasan Timur Indonesia (KTI) dan pendukung perminyakan di Pamatata
2. Pengembangan kawasan industri perikanan terpadu dan pusat budidaya ikan karang nasional
3. Pengembangan pusat destinasi pariwisata bahari andalan nasional

Sementara pada draft Revisi RTRW Kab. Kepulauan Selayar 2012 – 2032 juga telah menetapkan 3 agenda strategis yang sama dalam rangka pengembangan wilayah dan peningkatan peran ekonomi daerah terhadap regional dan nasional, yaitu :

1. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata yang direncanakan di Pulau Pasi Gusung Kecamatan Bontoharu dan Batu Kerapu dan sekitarnya di Kecamatan Bontosikuyu;
2. Pusat distribusi Logistik (barang dan jasa) Indonesia yang direncanakan di Kecamatan Bontomatene, tepatnya ujung utara Pulau Selayar; dan
3. Pengembangan Industri Perikanan Terpadu yang direncanakan berlokasi di Pattumbukang Kecamatan bontosikuyu tepatnya di ujung Selatan Pulau Selayar.

Pengembangan di atas adalah sebagai bentuk persiapan implementasi percepatan pembangunan dan peningkatan investasi Kab. Kepulauan Selayar. Keberhasilan pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar selanjutnya diperkirakan akan berdampak secara regional terhadap kabupaten tetangga di Provinsi Sulawesi Selatan, serta Kawasan Timur Indonesia secara umum. Pengembangan Kawasan ini sebagai implikasi kebijakan

Pemerintah melalui Strategi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Inpres No. 5/2008) dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kepmendagri No. 19/2008) untuk percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI.

Pembentukan kawasan yang dapat berfungsi sebagai katalisator dalam mempercepat transaksi ekonomi terutama dalam meningkatkan arus barang dan jasa adalah salah satu solusi yang ditawarkan dalam mendukung kebijakan pemerintah tersebut di atas. Kawasan utara pulau Selayar sebagai Kawasan Bandar Niaga KTI pada hakikatnya akan berfungsi seperti “Batam”-nya KTI agar masalah riil saat ini yakni minimnya pasokan barang yang berimbas kepada kenaikan harga dan inflasi yang penyebab utamanya adalah sistem logistic yang tidak efektif dan efisien di KTI dapat segera teratasi.

Permasalahan-permasalahan pada distribusi pupuk, BBM, beras, gula, dan logistic PEMILU adalah beberapa contoh persoalan distribusi barang tingkat domestik yang sering merepotkan pemerintah, yang tentunya menimbulkan persoalan sosial-ekonomi di KTI. Sistem distribusi logistic yang tidak efisien tercermin dari capaian sasaran yang hanya mencapai 14,08% dari biaya produksi yang mayoritas disebabkan tidak meratanya pembangunan industri di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari kebutuhan pokok pangan KTI masih dipasok dari Surabaya, sedangkan kebutuhan BBM KTI masih dipasok dari Balikpapan. Dengan contoh kasus tersebut maka peningkatan efisiensi biaya produksi menjadi suatu keharusan, dan ini hanya dapat dicapai dengan desentralisasi pembangunan di luar Pulau Jawa terutama di KTI yang saat ini merupakan daerah tertinggal di Indonesia. Daerah yang akan dikembangkan sebaiknya disyaratkan mempunyai potensi menyediakan bahan baku untuk industry yang hasilnya mempunyai daya saing dan berorientasi ekspor.

Kebijakan Pemerintah teradap percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI adalah sangat tepat mengingat pola pembangunan selama ini menimbulkan kesenjangan dan ketimpangan pendapatan bagi daerah-daerah tertinggal yang berakibat meningkatkan rasa ketidakpercayaan pemerintah

daerah terhadap pemerintah, yang pada gilirannya mengganggu keutuhan NKRI. Kesenjangan kesejahteraan dan ketimpangan pembangunan di KTI merupakan ironi karena disisi lain KTI memiliki kekayaan SDA yang berlimpah, baik sumber daya terbarukan maupun nirterbarukan.

Dalam upaya pemerataan, pembangunan agar KTI dapat sejajar dengan Kawasan Barat Indonesia (KBI) terutama dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional, maka diperlukan langkah nyata yang terkoordinasi dengan baik agar percepatan pembangunan dan peningkatan investasi di KTI dapat segera terwujud dengan pemanfaatan sebesar-besarnya keunggulan komparatif yang ada. Mengingat di kawasan utara Pulau Selayar juga merupakan kawasan sumberdaya minyak, maka pembangunan Industri Perminyakan Terpadu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari fungsionalisasi kawasan Bandar niaga KTI seperti yang diarahkan dalam Kajian Percepatan Pembangunan dan Peningkatan Investasi Daerah Tertinggal (Studi Kasus Kabupaten Selayar) pada tahun 2009. Atas hal tersebut maka pembentukan suatu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) termasuk kawasan (areal) industri perminyakan tersebut menjadi suatu kebutuhan yang mendasar dalam mempercepat pencapaian target yang telah ditentukan dari kajian tersebut.

1. Rencana Struktur Ruang

Rencana Struktur ruang Kabupaten Kepulauan Selayar dibangun dengan beberapa pusat kegiatan seperti rencana sistem perkotaan, rencana pengembangan sistem pedesaan, rencana sistem jaringan prasarana utama dan rencana sistem prasarana lainnya.

Di Kabupaten Kepulauan Selayar, berdasarkan RTRW Provinsi Sulawesi Selatan (Perda No. 9 Tahun 2009), telah ditetapkan dua kota PKL, yaitu masing-masing adalah Benteng dan Pamatata. Berdasarkan hasil analisis, kedua kota ini belum efektif dalam melayani seluruh wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri atas pulau-pulau. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar ke dalam satu satuan wilayah, diperlukan pengembangan pusat kegiatan yang setara PKL di pulau-pulau yang letaknya terpisah

dari daratan Pulau Selayar. Untuk itu, diusulkan dua kota lagi sebagai PKL Promosi (PKLp) yaitu Bonerate dan Kayuadi. Kedua kota ini masing-masing merupakan ibukota kecamatan yang peningkatan fungsinya dapat didorong untuk menjadi pusat kegiatan baru.

Untuk mendukung fungsi PKL, di Kabupaten Kepulauan Selayar dikembangkan sejumlah PPK yang skala pelayanannya mencakup satu kecamatan atau beberapa desa. PPK yang dimaksud adalah Matalalang, Polebungin, Pariangan, Batangmata, Buki, Ujung Jamepa dan Latokdok. Ketujuh PPK ini adalah Ibukota kecamatan yang ada dalam wilayah pelayanan PKL Benteng dan Pamatata serta PKLp Bonerate dan Kayuadi.

Pusat kegiatan dalam hirarki terendah yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar adalah PPL yang memiliki skala pelayanan desa atau beberapa kegiatan antar desa. PPL yang dimaksud adalah Padang, Barugaiya, appatanah, Pattumbukang, Jammeng, Onto di P. Selayar, Jinato, Tambuna, Rajuni, Karumpa, dan Pulo Madu di Kecamatan Takabonerate dan pasilambena. Penetapan PPL ini dilakukan untuk mengefektifkan pelayanan PPK.

2. Kawasan Strategis Kabupaten

Kawasan strategis di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK). KSP dalam Perda RTRW Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2008 yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar terdiri atas :

- a. Kawasan pengembangan pusat distribusi kebutuhan bahan pokok KTI di Pamatata yang merupakan KSP dari sudut sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi ;
- b. Kawasan Migas Blok Selayar yang merupakan KSP dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi ;
- c. Kawasan wisata bahari Takabonerate yang merupakan KSN dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- d. Kawasan pengembangan budidaya alternatif Komuditas Kelapa, Jambu mete, Kakao, Kenari dan Vanili. (KSP)

Berdasarkan arahan kebijakan dan hasil analisis yang dilakukan serta dinamika pembangunan yang terjadi menuntut adanya kawasan-kawasan pengembangan baru yang dapat meningkatkan kinerja pertumbuhan wilayah kabupaten di masa mendatang. Dengan memperhitungkan kajian kualitatif dan kuantitatif terhadap aspek sosial, ekonomi dan fisik wilayah, maka Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) yang dikembangkan harus mencerminkan dukungan terhadap pengembangan kegiatan sektoral yang diandalkan di wilayah ini, antara lain:

- a. Pengembangan potensi kelautan/maritim,
- b. Pengembangan potensi perikanan,
- c. Pengembangan potensi agroindustry (tanaman pangan dan perkebunan),
- d. Pengembangan industry hilir,
- e. Pengembangan kegiatan pariwisata.

Memperhatikan kepentingan sektoral tersebut di atas, maka kawasan strategis yang dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi dan dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi serta dari sudut fungsi dan daya dukung lingkungan hidup dalam Perda RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 5 Tahun 2012, yaitu :

- a. Kawasan yang diprioritaskan untuk industri perminyakan di Kecamatan Bontomatene (KSK),
- b. Kawasan yang diprioritaskan untuk sentra kegiatan pertanian pangan di Jampea (KSK), serta
- c. Kawasan Kawasan Budidaya Ikan Karang di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate (KSK),
- d. Kawasan pariwisata terpadu di Kecamatan Benteng dan Bontoharu (KSK),
- e. Kawasan Perkotaan Kayuadi di kecamatan Takabonerate dan Perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu,(KSK)

Dalam Draf Perda Revisi RTRW Kabupaten Kepulauan Selayar juga menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten, yaitu:

- a. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi; dan

- b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, terdiri atas :

- a. Kawasan industri Pamatata di Kecamatan Bontomatene;
- b. Kawasan Khusus Pariwisata Bontosikuyu;
- c. Kawasan Khusus Pariwisata Pasi gusung;
- d. kawasan sentra pertanian tanaman pangan di Kecamatan Pasimasunggu dan Kecamatan Pasimasunggu Timur;
- e. Kawasan budidaya ikan karang di Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Takabonerate;
- f. Kawasan pariwisata terpadu;
- g. Kawasan perkotaan Kayuadi di Kecamatan Takabonerate;
- h. Kawasan perkotaan Bonerate di Kecamatan Pasimarannu;
- i. Kawasan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu di Hangkoang; dan
- j. Kawasan strategis cepat tumbuh (Pengembangan Kota Baru Benteng).

Kawasan Strategis Kabupaten dengan sudut kepentingan lingkungan hidup merupakan Kawasan Konservasi Perairan Daerah (KKPD) ditetapkan Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Bontomatene, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Takabonerate, Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan Pasimasunggu Timur, Kecamatan Pasimarannu, dan Kecamatan Pasilambena.

Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar berperan penting dalam mengembangkan kawasan-kawasan tersebut diatang dengan berbagai program yang telah ditetapkan dalam RPJMD

3.4.2 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

a. Pencapaian Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Hasil identifikasi pencapaian indikator SDGs/TPB, Kabupaten Kepulauan Selayar hanya melaksanakan 17 tujuan yang terbagi dalam 196 indikator dari 220 indikator TPB yang menjadi kewenangan kabupaten, dengan gambaran sebagai berikut : a) 46% indikator sudah dilaksanakan dan sudah

mencapai target nasional (90 indikator); b) 26% indikator yang sudah dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (51 indikator); c) 9% indikator yang belum dilaksanakan dan belum mencapai target nasional (17 indikator), (d) 19% indikator yang belum memiliki data (38 indikator).

Indikator TPB yang telah dilaksanakan dan tersedia data hanya 72% yang terdiri atas 141 indikator, sehingga masih terdapat 28% atau sekitar 55 indikator yang belum dilaksanakan dan belum ada data. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar sudah cukup baik, sehingga diupayakan dapat dipertahankan pada periode selanjutnya.

Berdasarkan hasil identifikasi indikator TPB di Kabupaten Kepulauan Selayar, terdapat 25 perangkat daerah yang berkontribusi baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap pencapaian indikator TPB. Adapun perangkat daerah tersebut antara lain :

- 1) Badan kesatuan Bangsa dan Polinmas
- 2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pengelolaan Aset Daerah
- 4) Badan Pengelolaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
- 5) Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah
- 6) Bagian Hukum Sekretariat Daerah
- 7) Bagian Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian
- 8) Bagian Organisasi dan Kepegawaian Sekretariat
- 9) Bagian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 10) Dinas Kepariwisata
- 11) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
- 12) Dinas Kesehatan
- 13) Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- 14) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 15) Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
- 16) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
- 17) Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Naker
- 18) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- 19) Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
- 20) Dinas Perhubungan
- 21) Dinas Perikanan dan Kelautan
- 22) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- 23) Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman
- 24) Dinas Sosial
- 25) Inspektorat Daerah

b. Rekomendasi KLHS RPJMD.

Berdasarkan pada rumusan isu prioritas KLHS RPJMD direkomendasikan beberapa kebijakan strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar. Adapun kebijakan strategis tersebut antara lain:

Tabel 3.3
Kebijakan Strategis dalam mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Selayar

NO	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
1	Resiko Bencana	(11) Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	Mengurangi resiko bencana, meningkatkan kapasitas dan adaptasi terhadap perubahan iklim
2	Kemiskinan	(1) Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Optimalisasi program penanggulangan kemiskinan
3	Pengelolaan Sumber Daya Air, Air Bersih dan Sanitasi	(6) Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	Optimalisasi pengelolaan sumber daya air
4	Pekerjaan Layak	(8) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang	

		Layak untuk Semua	
5	Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkebun	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan industri pengolahan produk pertanian dan perkebunan serta perikanan
NO	Isu Prioritas Pembangunan Berkelanjutan	TPB Terkait	Kebijakan Strategis
6	Aksesibilitas dan Infrastruktur	(9) Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	Pengembangan infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan aksesibilitas antar wilayah
7	Tata Kelola Pemerintahan	(16) Memperkuat Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediakan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan beberapa indikator dan target yang akan digunakan sebagai kriteria pengukuran. Terdapat 93 indikator TPB yang direkomendasikan. Sementara untuk merealisasikan indikator tersebut direkomendasikan beberapa program dan kegiatan sesuai Permendagri 90 Tahun 2019 yang dapat mendukung pencapaian TPB dan penyelesaian isu prioritas pembangunan berkelanjutan.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi atau suatu hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Dinas Sosial di masa datang.

Ada beberapa isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja dari Dinas Sosial yang sejalan dalam RPJMD Kabupaten yaitu :

1. Rendahnya sistem, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial

Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pelayanan sesuai bidang urusannya, masih sering menemukan beberapa kendala terkait system, kelembagaan dan pengawasan terhadap pelayanan di bidang Sosial. Hasil penilaian yang didapatkan terhadap pelayanan yang dilakukan seperti Indeks reformasi birokrasi, Nilai saki dan Tingkat kepuasan masyarakat masih rendah dan perlu ditingkatkan.

2. Belum adanya sarana dan prasarana rumah singgah/panti sosial

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial perlu adanya sarana rumah singgah yang digunakan penanganan terhadap beberapa jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti Orang terlantar, Anak terlantar, Anak berhadapan hukum dan lain sebagainya.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan

Perumusan tujuan dan sasaran berdasarkan visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kemudian menjadi landasan perumusan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Kriteria rumusan tujuan pembangunan antara lain sebagai berikut: (1) diturunkan secara lebih operasional dari masing-masing misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan dengan memperhatikan visi; (2) untuk mewujudkan misi dapat dicapai melalui beberapa tujuan; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah; (4) dapat diukur dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan; dan (5) disusun dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami.

Tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah periode 2021 – 2026 yang terkait dengan urusan Sosial yaitu terdiri dari dua tujuan antara lain :

1. Meningkatkan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial masyarakat dengan indikator tujuan persentase penurunan jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta
2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial dengan indikator meningkatnya nilai SAKIP Dinas Sosial, Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat serta meningkatnya tertib administrasi keuangan dan aset daerah.

4.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah / Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: (1) dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; (2) untuk

mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; (3) disusun dengan memperhatikan permasalahan dan isu-isu strategis pembangunan daerah.

Berdasarkan tujuan tersebut diatas, maka sasaran yang ingin dicapai adalah Meningkatkan Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

- Meningkatkan taraf pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi perseorangan, keluarga kelompok, dan atau masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya baik secara jasmani, rohani maupun sosial secara memadai dan wajar
- Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yaitu Karang Taruna, PSM, TKSK, Orsos, Tagana, Lembaga Kesejahteraan Sosial, LKS, LK3, WKSBM, Penyuluh Sosial dan Dunia Usaha dalam penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Keterkaitan antara tujuan, sasaran, indikator sasaran serta target capaian kinerja dari penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Sosial	Meningkatnya Nilai Sakip	Nilai Sakip Dinas Sosial	CC	B	B	BB	BB	BB
			Perencanaan Kinerja	24	25	25	26	27	27
			Pengukuran Kinerja	10	11	11	12	13	13
			Pelaporan Kinerja	10	11	12	13	14	14
			Evaluasi Internal	7	8	8	9	10	10
			Pencapaian Kinerja	9	10	11	12	13	13
		Meningkatnya kualitas pelayanan masyarakat	Indeks Kepuasan Layanan	70,00	72,50	75,00	80,00	85,00	85,00

		Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Laporan keuangan Dinas Sosial sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
2	Meningkatkan penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
			Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	70,00	72,50	75,00	77,50	80,00	80,00

Tabel 4.2
Perubahan Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-					Kondisi Akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas sosial	Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial	B	B	B	B	BB	BB
			Nilai Sakip Dinas Sosial	C	C	B	BB	BB	BB
			Laporan Keuangan Dinas Sosial sesuai SAP	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai
			Indeks kepuasan masyarakat	70,00	72,50	72,50	75,00	80,00	80,00

2	Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65,00	70,00	70,00	80,00	80,00	80,00
			Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65,00	70,00	75,00	80,00	85,00	85,00
			Persentase Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	70,00	72.50	75,50	77,50	80,00	80,00

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Kebijakan adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan keputusan. Kebijakan senantiasa berorientasi kepada masalah (*problem-oriented*) dan juga berorientasi kepada tindakan (*action-oriented*), sehingga dapat dinyatakan bahwa Kebijakan adalah suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan. Rumusan Strategi yang harus dilakukan dalam rangka upaya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah maka Dinas Sosial menetapkan strategi yang di arahkan pada Meningkatnya Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

5.2 Arah Kebijakan

Unsur penting dalam mencapai Visi dan Misi adalah Kebijakan. Kebijakan merupakan uraian pernyataan yang menjelaskan bagaimana Misi, Tujuan dan Strategi akan diwujudkan. Strategi menunjukkan fokus atau prioritas perhatian yang ditetapkan untuk mendukung terjaganya proses pembangunan agar menuju pada pencapaian Misi, Tujuan dan Sasaran dalam kurung waktu 5 tahun mendatang. Rumusan Arah Kebijakan Urusan Sosial adalah sebagai berikut :

- Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan.
- Peningkatan pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
- Meningkatkan kesejahteraan pegawai.
- Mengembangkan dan menyerasikan kebijakan Pemerintah Pusat dan daerah serta menyiapkan perangkat hukum sebagai pendukung kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial.
- Menangani permasalahan kesejahteraan sosial yang ada serta mencegah dan mengendalikan muncul dan berkembangnya permasalahan sosial.
- Meningkatkan kepedulian terhadap Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandang pengemis dan korban bencana, pencegahan dan pengendalian muncul dan berkembangnya permasalahan sosial serta pengembangan kapasitas lembaga pelayanan pemerintah.

- Meningkatkan kepedulian terhadap eks penyandang penyakit sosial.
- Meningkatkan peran aktif masyarakat dan dunia usaha serta sumber daya kesejahteraan sosial, pilar-pilar partisipasi sosial lainnya dalam penyelenggaraan pembangunan kesejahteraan sosial dan peningkatan upaya pelestarian, penghayatan, penerusan dan pengamalan nilai-nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sosial.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"			
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Meningkatnya nilai sakiip dinas sosial ----- Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat ----- Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Persentase administrasi kinerja perangkat daerah
Misi 2 : Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan			
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat	Meningkatnya kesejahteraan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Meningkatkan Penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Peningkatan PPKS dan PSKS yang dibina dan di berdayakan
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatkan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Masyarakat	Meningkatnya Pemenuhan kebutuhan Dasar terhadap Penerima Layanan SPM	Meningkatkan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1. Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- 2. Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial ----- 3. Peningkatan jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan

Tabel 5.2
Perubahan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Visi : "Kepulauan Selayar Sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia"			
Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas sosial	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik	Peningkatan Persentase administrasi kinerja perangkat daerah
Misi 3 : Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat			
Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat	Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan Kebutuhan Dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Meningkatkan Kapasitas Penerapan Standar Pelayanan Minimal	1.Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terpenuhi kebutuhan dasarnya ----- 2.Peningkatan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang Memperoleh Jaminan Sosial ----- 3.Peningkatan jumlah Korban bencana yang mendapatkan bantuan

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran kebijakan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai berikut :

1. Program Pemberdayaan Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

1. Kegiatan Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)
 - a. Sub Kegiatan Fasilitas Pemberdayaan Sosial KAT
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Pendamping KAT
2. Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota
 - d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota
 - e. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)

2. Program Rehabilitas Sosial

Kegiatan pada program ini meliputi :

1. Kegiatan Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis Diluar Panti Sosial
 - a. Sub Kegiatan Penyandang Permakanan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c. Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - d. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga

- e. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual, dan Sosial
 - f. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat
 - g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan Akta Kelahiran Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - h. Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesejahteraan Dasar
 - i. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - j. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - k. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga
 - l. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
2. Kegiatan Rehabilitas Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial
- a. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Alat Bantu
 - e. Sub Kegiatan Penyediaan layanan dan Reunifikasi Keluarga
 - f. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Rujukan
 - g. Sub Kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan
 - h. Sub Kegiatan Penyediaan Pembekalan Kesehatan di luar Panti
 - i. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial
 - j. Sub Kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA
 - k. Sub Kegiatan Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak
 - l. Sub Kegiatan Pemberian Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
 - m. Sub Kegiatan Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga

3. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial.

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Pemeliharaan Anak Terlantar
 - a. Sub Kegiatan Penjangkauan Anak-Anak Terlantar
 - b. Sub Kegiatan Rujukan Anak-Anak Terlantar
 - c. Sub Kegiatan Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar
2. Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota
 - c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
 - d. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat

4. Program Penanganan Bencana

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/Kota .
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Makanan
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Sandang
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - d. Sub Kegiatan Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - e. Sub Kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial
2. Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiap Siagaan Bencana Kabupaten/Kota
 - a. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi Dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana

5. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

1. Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan
 - a. Sub Kegiatan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota
 - b. Sub Kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional

6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Program Ini Meliputi:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - b. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD
 - d. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD
 - e. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD
 - f. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - g. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
 - b. Sub Bagian Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
 - d. Sub Kegiatan Pengelolaan Dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
 - e. Sub Kegiatan Penyusunan Pelaporan Dan Analisa Progres Realisasi Anggaran
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD
 - b. Sub Kegiatan Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD
 - c. Sub Kegiatan Penata Usahaan Barang Milik Daerah
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - a. Sub Kegiatan Peningkatan Sarana Dan Prasarana Disiplin Pegawai

- b. Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dina Beserta Atribut Kelengkapannya
 - c. Sub Kegiatan Koordinasi Dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
 - d. Sub Kegiatan Pendidikan Dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas Dan Fungsi
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Logistik Kantor
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan Dan Pengadaan
 - d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Menunjang Urusan Pemerintah Daerah
- a. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan Dan Mesin Lain
 - b. Sub Kegiatan Pengadaan Mabel
 - c. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
7. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
 - c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
8. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- a. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
 - b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
 - c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Dan Mesin Lainnya
 - d. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
 - e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Aset Tak Berwujud

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
		Bd. Urusan	Progr. m	Kegiatan	Sub. Kegiatan			4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20		21	22
																								Target	Rp. (jt)		
Indeks Kepuasan layanan		06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	30.000.000	100	20.000.000	100	45.000.000									
		06	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD						1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000		20.000.000							
			01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah										1 Dokumen	5.000.000		5.000.000							
			01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah										1 Laporan	5.000.000		5.000.000							
			01	2.03	04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD										1 Laporan	5.000.000		5.000.000							
		06	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		50.000.000					
		06	01	2.03	06	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD							1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		30.000.000						
			01	2.03	07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD										1 Dokumen	5.000.000		5.000.000							
		06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			80.000.000		80.000.000	100	80.000.000	100	110.000.000		150.000.000									
		06	01	2.05	01	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000		60.000.000					
		06	01	2.05	02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000		55.000.000					
			01	2.05	03	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai																				
		06	01	2.05	04	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian		1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000		55.000.000					
			01	2.05	05	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai																				
			01	2.05	06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan																				
			01	2.05	07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas																				
		01	2.05	08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan																					
	06	01	2.05	09	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	5 Orang	50.000.000	11Orang	80.000.000	11 Orang	100.000.000				330.000.000						
		01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan																					
		01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan																					

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
		Bid. Urusan	Progr am	Kegiatan	Sub-kegiatan			4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20		21	22
																								Target	Rp. (jt)		
		06	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	100	100	335.000.000	100	400.000.000	100	480.000.000	100	335.000.000	100	350.000.000									
			01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan								1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000									
			01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan											5.000.000									
			01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan																				
			06	01	2.06	04	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	20.000.000		60.000.000						
			06	01	2.06	05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket	15.000.000	4 Paket	30.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000		75.000.000						
			06	01	2.06	06	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	1 Tahun	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000		50.000.000						
				01	2.06	07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan																			
				01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu																			
				01	2.06	09	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000		1.700.000.000						
				01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD																			
				01	2.06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																			
		06	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	100	160.000.000	100	335.000.000	100	200.000.000	100	315.000.000	100	290.000.000									
			01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																				
			01	2.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan																				
			01	2.07	03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan																				
			01	2.07	04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor																					
			01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Unit	11 Unit	25.000.000	11 Unit	50.000.000	7 Unit	40.000.000	11 Unit	50.000.000	11 Unit	50.000.000		215.000.000							
			06	01	2.07	06	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	19 Unit	9 Unit	110.000.000	13 Unit	110.000.000	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000		530.000.000								
				01	2.07	07	Pengadaan Aset Lainnya	Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disediakan																			
				01	2.07	08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan																			
			06	01	2.07	09	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan				1 Unit	150.000.000		0	1 Unit	125.000.000	1 Unit	100.000.000		375.000.000						
				01	2.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan																			
			06	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit	6 unit	25.000.000	6 unit	25.000.000	8 unit	50.000.000	4 Unit	40.000.000	4 Unit	40.000.000		180.000.000						
		06	01	2.08		Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	100	100	577.046.737	100	559.507.899	100	567.421.195	100	601.208.658	100	603.836.310									
			06	01	2.08	01	Peyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		40.000.000						
			06	01	2.08	02	Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Peyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan	100.046.737	1 Laporan	100.507.899	1 Laporan	100.421.195	1 Laporan	120.208.658	1 Laporan	122.836.310		544.020.799						

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Saaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi				
		Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan			4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20		21	22
																								Target	Rp. (jt)		
			01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan								1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000		20.000.000							
		06	01	2.08	04	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	472.000.000	1 Laporan	454.000.000	1 Laporan	457.000.000	1 Laporan	461.000.000	1 Laporan	461.000.000		2.305.000.000							
		06	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	340.000.000	100	340.000.000	100	240.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000									
			01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya																				
			01	2.09	02	Penyediaan jasa pemeliharaan,biaya pemeliharaan,pajak,dan perizinan kendaraan dinas operasinalatau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit	120.000.000	37 Unit	120.000.000	37 Unit	120.000.000	37 Unit	110.000.000	37 Unit	150.000.000		620.000.000							
			01	2.09	03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya													0							
			01	2.09	04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya													0							
			01	2.09	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan													0							
			01	2.09	06	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000		50.000.000							
			01	2.09	07	Pemeliharaan aset tetap lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	57 Unit	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000		50.000.000							
			01	2.09	08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara								4 Unit	10.000.000				10.000.000							
		06	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 unit	200.000.000	1 Unit	200.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000		700.000.000							
			01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi								1 Unit	20.000.000				20.000.000							
			01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi								1 Unit	10.000.000				10.000.000							
			01	2.09	12	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi													0							
Meningkatnya Pelayanan dan Pemenuhan kebutuhan dasar Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase peningkatan kualitas Sumber Daya manusia dan pelayanan Potensi Sumber kesejahteraan Sosial (PSKS)	06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan	18,99	32,67	355.000.000	37,59	359.859.950	42,40	368.867.245	44,81	377.716.370	50,00	386.728.682									
		06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang difasilitasi	n/a	100	50.000.000	100	50.000.000	100	53.867.245	100	82.716.370	100	46.728.682									
			06	02	2.01	01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	349 Keluarga						10 Keluarga	52.716.370	10 Keluarga	46.728.682		99.445.052							
			06	02	2.01	02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkat Kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	n/a	10 Keluarga	50.000.000	10 Keluarga	50.000.000	10 Keluarga	53.867.245	10 Keluarga	30.000.000			183.867.245							
			02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Daerah yang dikumpulkan	0	0	0	0	0	0	0	20.000.000	0	0	0	0	0	0	0					
			02	2.02	01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang								1 Dokumen	20.000.000				20.000.000							

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022										Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Target	Rp. (jt)				
						Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)						
Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
		06	02	2.03	Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan sosial	100	100	305.000.000	100	309.859.950	100	315.000.000	100	275.000.000	100	340.000.000				
		06	02	2.03	01 Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	30 Orang	55.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	50.000.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	60.000.000		255.000.000		
		06	02	2.03	02 Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	11 Orang	11 Orang	50.000.000	11 Orang	50.000.000	11 Orang	60.000.000	11 Orang	60.000.000	11 Orang	60.000.000		280.000.000		
		06	02	2.03	03 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	4 Orang	10 Orang	50.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	50.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	50.000.000		260.000.000		
		06	02	2.03	04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	3 Karang Taruna	3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	70.000.000	3 Lembaga	100.000.000		470.000.000		
		06	02	2.03	05 Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	15 Orang	50.000.000	15 Sertifikat	54.859.950	15 Sertifikat	55.000.000	15 Sertifikat	50.000.000	15 Sertifikat	70.000.000		279.859.950		
	Persentase Peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	06	04		PROGRAM REHABILITAS SOSIAL																
						Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18.99	100	6.385.000.000	100	6.472.410.650	100	6.634.413.089	100	6.793.574.707	100	6.955.669.399				
						Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31.99	100		100		100		100		100					
						Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi di luar panti	17.35	100		100		100		100		100					
						Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	25.00	100		100		100		100		100					
						Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	17.36	18.36		100		100		100		100					
		06	04	2.01	Rehabilitas Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	89.1	3.010.000.000	89.1	3.722.410.650	89.1	2.714.415.089	89.1	3.073.574.707	89.1	2.975.669.399				
		06	04	2.01	01 Penyandang Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1.010 Orang	600 Orang	2.360.000.000	700 Orang	2.720.000.000	500 Orang	2.100.000.000	600 Orang	2.360.000.000	600 Orang	2.360.000.000		11.900.000.000		
		06	04	2.01	02 Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan kabupaten/kota	1.010 Orang	130 Orang	200.000.000	200 Orang	240.000.000	130 Orang	180.000.000	150 Orang	210.000.000	100 Orang	150.000.000		980.000.000		
		06	04	2.01	03 Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	22 Orang	100 Orang	150.000.000	100 Orang	250.000.000	100 Orang	130.000.000	120 Orang	150.000.000	120 Orang	150.000.000		830.000.000		
		06	04	2.01	04 Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota				5 Orang	10.000.000	5 Orang	7.000.000	5 Orang	10.000.000				27.000.000		
		06	04	2.01	05 Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota				5 Orang	10.000.000	5 Orang	7.415.089	5 Orang	10.000.000				27.415.089		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan			4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			21	22	
																					Target					Rp. (jt)
		06	04	2.01	06	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kkabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	150.000.000	30 Orang	200.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000		800.000.000						
		06	04	2.01	07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan				10 Orang	12.410.650	5 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000		37.410.650						
		06	04	2.01	08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota				10 Orang	10.000.000	5 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000		35.000.000						
		06	04	2.01	09	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota				5 Orang	10.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000		35.000.000						
		06	04	2.01	10	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	30 orang	50.000.000	30 orang	100.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000		300.000.000						
		06	04	2.01	11	Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota				5 Orang	10.000.000	5 Orang	5.000.000	5 Orang	13.574.707	5 Orang	15.669.399		44.244.106						
		06	04	2.01	12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	10 Orang	100.000.000	20 Orang	150.000.000	10 Orang	70.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	70.000.000		480.000.000						
		06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/Aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	11.9%	3.375.000.000	11.9%	2.750.000.000	11.9%	3.920.000.000	11.9%	3.720.000.000	11.9%	3.980.000.000								
		06	04	2.02	01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	12579 KPM	12597 Orang	100.000.000	12597 Orang	150.000.000	10558 Orang	150.000.000	10558 Orang	100.000.000	10558 Orang	100.000.000		600.000.000						
		06	04	2.02	02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan kabupaten/kota							0	20 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000		20.000.000						
		06	04	2.02	03	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1215 KK	600 Orang	550.000.000	900 Orang	800.000.000	900 Orang	800.000.000	900 Orang	800.000.000	900 Orang	1.000.000.000		3.950.000.000						
		06	04	2.02	04	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota							0						0						
		06	04	2.02	05	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	100 KK	300 Orang	375.000.000	150 Orang	400.000.000	200 Orang	500.000.000	200 Orang	500.000.000	200 Orang	500.000.000		2.275.000.000						
		06	04	2.02	06	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota							0						0						
		06	04	2.02	07	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1 Kali						0	10 Orang	20.000.000	20 Orang	30.000.000		50.000.000						
		06	04	2.02	08	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA	jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA							0						0						
		06	04	2.02	09	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah	1 Tahun						0	10 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000		40.000.000						
		06	04	2.02	10	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	100 KK	100 Orang	70.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	100.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	100.000.000		570.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub. Kegiatan			4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			20	21	22
		04	2.02	11	Pemberian pelayanan penulisan keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penulisan keluarga kewenangan kabupaten/kota																				
		06	04	2.02	12	Pemberian Layanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	27 KK	27 Orang	80.000.000	27 Orang	100.000.000	15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000		390.000.000						
		06	04	2.02	13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	241 KK	200 Orang	2.200.000.000	80 Orang	1.000.000.000	200 Orang	2.150.000.000	170 Orang	1.900.000.000	140 Orang	2.000.000.000		9.250.000.000						
		06	04	2.02	14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota				3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000		600.000.000						
		06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	30.11	35.15	260.000.000	38.12	263.559.400	42.15	270.156.292	45.5	276.637.341	50.0	283.237.908								
		06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara			110.000.000		163.559.400		120.156.292		126.637.341		103.237.908								
		06	05	2.01	01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang	30.000.000	50 Orang	50.000.000	30 Orang	40.156.292	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000		180.156.292						
		06	05	2.01	02	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	80.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	40.000.000		350.000.000						
		06	05	2.01	03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpeliharaan kewenangan kabupaten/kota	372 Anak			20 Orang	33.559.400			20 Orang	26.637.341	20 Orang	33.237.908		93.434.649						
		06	05	2.01		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	36		150.000.000		100.000.000		150.000.000		150.000.000		180.000.000								
		06	05	2.02	01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	15904 Keluarga								16.119 Keluarga	100.000.000		100.000.000							
		06	05	2.02	02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	16.119 Keluarga	24837 Keluarga	150.000.000	24837 Keluarga	100.000.000	24837 Keluarga	150.000.000	24837 Keluarga	150.000.000	24837 Keluarga	80.000.000		630.000.000						
		06	05	2.02	03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan	900 KK												0						
		06	05	2.02	04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan													0						
		06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana	100%	100%	300.000.000	100%	304.107.000	100%	311.718.798	100%	319.196.932	100%	326.812.971								
		06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100%	100%	200.000.000	100%	204.107.000	100%	200.000.000	100%	209.196.932	100%	216.812.971		1.030.116.903						
		06	06	2.01	01	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dala masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	60 KK Korban Bencana dan 4721 KK Dampak Covid-19	80 Orang	100.000.000	50 Orang	100.000.000	30 Orang	60.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000		460.000.000						
		06	06	2.01	02	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana		30 Orang	50.000.000	30 Orang	50.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000	30 Orang	40.000.000		220.000.000						
		06	06	2.01	03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota		30 Orang	1 Unit	50.000.000	1 Unit	54.107.000	1 Unit	30.000.000	1 Unit	20.000.000	1 Unit	30.000.000		184.107.000					
		06	06	2.01	04	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan		32 Orang				30 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000	30 Orang	30.000.000		90.000.000						
		06	06	2.01	05	Pelayanan Dukungan Psikososial	jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan kabupaten/kota		32 Orang				30 Orang	40.000.000	15 Orang	19.196.932	10 Orang	16.812.971		76.009.903						

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)										Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Tahun 2022		Tahun 2023				Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Target	Rp. (jt)						
		Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)			Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)								
Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan	4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
06	06	2.02			Peyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan	100%	100%	100.000.000	100%	100.000.000	100%	111.718.798	100%	110.000.000	100%	110.000.000				
06	06	2.02	01		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah kampung yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan kampung siaga bencana kewenangan kabupaten/kota	n/a				2 Kampung	31.718.798	2 Kampung	10.000.000	2 Kampung	10.000.000		51.718.798			
06	06	2.02	02		Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	22 Orang	100.000.000	22 Orang	100.000.000	22 Orang	80.000.000	22 Orang	100.000.000	22 Orang	100.000.000		480.000.000		
06	07				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Jumlah Taman Makam Pahlawan yang di kelola	1 Unit	1 Unit	20.000.000	1 Unit	20.273.800	1 Unit	20.781.253	1 Unit	21.279.795	1 Unit	21.787.531				
06	07	2.01			Pemeliharaan taman makam pahlawan nasional kabupaten/kota	Persentase Taman Makam Pahlawan yang di pelihara	100	100	20.000.000	100	20.273.800	100	20.781.253	100	21.279.795	100	21.787.531				
06	07	2.01	01		Rehabilitasi sarana dan prasarana taman pahlawan nasional kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam															
06	07	2.01	02		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota	1 Unit	Jumlah 28 Makam	20.000.000	Jumlah 28 Makam	20.273.800	Jumlah 28 Makam	20.781.253	Jumlah 28 Makam	21.279.795	Jumlah 28 Makam	21.787.531		104.122.379		



TABEL 6.2
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 050-5889 TAHUN 2021
DINAS SOSIAL KAB.KEPULAUAN SELAYAR

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Data Capaian pada Tahun Awal	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab
						Tahun-1 (2022)		Tahun-2 (2023)		Tahun-3 (2024)		Tahun-4 (2025)		Tahun-5 (2026)		(12)		
						(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	(13)	
Mewujudkan Reformasi Birokrasi Dinas Sosial				Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial	CC	B		B		B		B		BB		BB		
	Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas sosial			Nilai Sakip Dinas Sosial	C	C		C		B		BB		BB		BB		
				Laporan Keuangan Dinas Sosial sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		100		100
				Indeks kepuasan masyarakat	70,00	70,00		72,50		72,50		75,00		80,00		80,00		
		1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/K	Persentase Capaian Kinerja	50,91	63,03	4,003,169,656	70,28	4,057,973,049	70,53	4,159,544,114	71,51	4,259,331,577	72,31	4,360,959,229	72,31	20,840,977,625	DINAS SOSIAL
				Persentase Capaian Kinerja Keuangan	79,35	83		85		88		91		95		95		
		1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun	100	100	134,000,000	100	114,000,000	100	185,000,000	100	220,000,000	100	250,000,000	100	903,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1	2	14,000,000	2	14,000,000	2	15,000,000	2	20,000,000	2	25,000,000	10	88,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.02.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	5	45,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	4	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	11,000,000	1	10,000,000	5	51,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	11	15,000,000	15	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	4	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	10,000,000	4	15,000,000	20	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0	0	0	1	10,000,000	1	15,000,000	1	15,000,000	3	40,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Tersusun	100	100	10,000,000	100	10,000,000	100	30,000,000	100	20,000,000	100	50,000,000	100	120,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	1	10,000,000	0	0	1	10,000,000	2	20,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	1	5	70,000,000	5	50,000,000	5	120,000,000	5	150,000,000	5	150,000,000	25	540,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Keuangan yang Tersusun	100	100	2,367,122,919	100	2,219,465,150	100	2,377,122,919	100	2,388,122,919	100	2,402,122,919	100	11,753,956,826	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	24	24	2,327,122,919	24	2,179,465,150	24	2,327,122,919	24	2,327,122,919	24	2,327,122,919	120	11,487,956,826	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	1	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.03.02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah SKPD dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	50,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	0	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	3	30,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.03.07	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	80,000,000	100	80,000,000	100	80,000,000	100	110,000,000	100	150,000,000	100	500,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	10,000,000	2	20,000,000	10	60,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.05.02	Pengadaan Pakiaian Dinas beserta AtributKelengkapannya	Jumlah Paket Pakiaian Dinas beserta AtributKelengkapan (Paket)	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.03	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKpegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan PengolahanAdminist rasi Kpegawaian (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kpegawaian (Dokumen)	0	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	15,000,000	5	55,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, danPenilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.06	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.07	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalamMelaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yangMeninggal dalam Melaksanakan Tugas (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.08	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	0	5	50,000,000	5	50,000,000	5	50,000,000	11	80,000,000	11	100,000,000	37	330,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL	
		1.06.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	100	100	335,000,000	100	400,000,000	100	480,000,000	100	335,000,000	100	345,000,000	100	1,895,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	1	5,000,000	1	5,000,000	2	10,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	20,000,000	5	60,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	15,000,000	1	30,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	75,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	11	6	25,000,000	6	25,000,000	8	50,000,000	4	40,000,000	4	40,000,000	28	180,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Penunjang yang tersedia	100	100	577,046,737	100	559,507,899	100	567,421,195	100	601,208,658	100	603,836,310	100	2,909,020,799	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	5,000,000	1	5,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	1	10,000,000	5	40,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	100,046,737	1	100,507,899	1	100,421,195	1	120,208,658	1	122,836,310	5	544,020,799	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	1	10,000,000	1	10,000,000	2	20,000,000	DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	472,000,000	1	454,000,000	1	457,000,000	1	461,000,000	1	461,000,000	5	2,305,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100	340,000,000	100	340,000,000	100	240,000,000	100	270,000,000	100	270,000,000	100	1,460,000,000	DINAS SOSIAL

		0.00.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	39	39	120,000,000	39	120,000,000	39	120,000,000	39	110,000,000	39	150,000,000	195	620,000,000					DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.09.03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.2.09.04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0	DINAS SOSIAL	
		0.00.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	14	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	14	10,000,000	70	50,000,000					DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	7	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	7	10,000,000	35	50,000,000					DINAS SOSIAL
		0.00.01.2.09.08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	0	0		0	0		0	0		0	4	10,000,000	0	0	4	10,000,000		DINAS SOSIAL

		1.06.07.2.01.02	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Makam yang Terpenuhi pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota (Makam)	28	28	20,000,000	28	20,273,800	28	20,781,253	28	21,279,795	28	21,787,531	140	104,122,379	DINAS SOSIAL
		1.06.07.2.01.03	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat				Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65	65	11,323,169,656	70	11,478,183,849	70	11,765,482,791	80	12,047,736,722	80	12,335,195,720	80	58,949,768,738	
	Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial			Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	0	65	11,323,169,656	70	11,478,183,849	75	11,765,482,791	80	12,047,736,722	85	12,335,195,720	85	58,949,768,738	
				Persentase peningkatan kualitas SDM dan pelayanan PSKS	0	70		72.5		75.5		77.5		80		80		
		1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang Diberdayakan	17,74	32,67	355,000,000	37,59	359,859,950	42,4	368,867,245	44,81	377,716,370	50	386,728,682	50	1,848,172,247	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.01	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang difasilitasi	0	100	50,000,000	100	50,000,000	100	53,867,245	100	82,716,370	100	46,728,682	100	283,312,297	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.01.01	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Mendapatkan Fasilitas Pemberdayaan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	349	0	0	0	0	0	0	10	52,716,370	10	46,728,682	20	99,445,052	DINAS SOSIAL

		1.06.02.2.01.02	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Terpenuhinya Keluarga pada KAT yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	10	50,000,000	10	50,000,000	10	53,867,245	10	30,000,000	0	0	40	183,867,245	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Daerah yang dikumpulkan	0	100	0	100	0	100	0	100	20,000,000	100	0	100	20,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang (Dokumen)	0	0	0	0	0	0	0	1	20,000,000	0	0	1	20,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber kesejahteraan Sosial yang mendapatkan bimbingan sosial	100	100	305,000,000	100	309,859,950	100	315,000,000	100	275,000,000	100	340,000,000	100	1,544,859,950	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03.01	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	30	55,000,000	20	50,000,000	20	50,000,000	20	40,000,000	20	60,000,000	110	255,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.02.2.03.02	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	11	11	50,000,000	11	50,000,000	11	60,000,000	11	60,000,000	11	60,000,000	55	280,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.04	REHABILITASI SOSIAL	Persentase Warga Negara/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial diluar panti	25	100		100		100		100		100		99		DINAS SOSIAL
				Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya bukan korban HIV/AIDS dan Nafza yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	17,36	18,36		21,32		24,5		25,92		28,22		28,22		
		1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (indikator SPM)	100	89,1	3,010,000,000	89,1	3,722,410,650	89,1	2,714,415,089	89,1	3,073,574,707	89,1	2,975,669,399	89,1	15,496,069,845	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.01	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1010	600	2,360,000,000	700	2,720,000,000	500	2,100,000,000	600	2,360,000,000	600	2,360,000,000	3000	11,900,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1010	130	200,000,000	200	240,000,000	130	180,000,000	150	210,000,000	100	150,000,000	710	980,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.04.2.01.03	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhanKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	100	150,000,000	100	250,000,000	100	130,000,000	120	150,000,000	120	150,000,000	540	830,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.04	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga KewenanganKabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	5	10,000,000	5	7,000,000	5	10,000,000	0	0	15	27,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.05	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental,Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	5	10,000,000	5	7,415,089	5	10,000,000	0	0	15	27,415,089	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.06	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan MasyarakatKewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	150,000,000	30	200,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	30	150,000,000	150	800,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.04.2.01.07	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	10	12,410,650	5	5,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	35	37,410,650	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.08	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	10	10,000,000	5	5,000,000	10	10,000,000	10	10,000,000	35	35,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.09	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	5	10,000,000	5	5,000,000	5	10,000,000	5	10,000,000	20	35,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	20	30	50,000,000	30	100,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	30	50,000,000	150	300,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.01.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	5	10,000,000	5	5,000,000	5	13,574,707	5	15,669,399	20	44,244,106	DINAS SOSIAL

		1.06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	5	10	100,000,000	20	150,000,000	10	70,000,000	10	90,000,000	10	70,000,000	60	480,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	100	11,9	3,375,000,000	11,9	2,750,000,000	11,9	3,920,000,000	11,9	3,720,000,000	11,9	3,980,000,000	11,9	17,745,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.01	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	12579	12579	100,000,000	12579	150,000,000	10558	150,000,000	10558	100,000,000	10558	100,000,000	56832	600,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.02	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	20	10,000,000	20	10,000,000	40	20,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.03	Penyediaan Permakanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	1215	600	550,000,000	900	800,000,000	900	800,000,000	900	800,000,000	900	1,000,000,000	4200	3,950,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.04.2.02.09	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	10	20,000,000	15	20,000,000	25	40,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	100	100	70,000,000	100	150,000,000	100	100,000,000	100	150,000,000	100	100,000,000	500	570,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	27	27	80,000,000	27	100,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	15	70,000,000	99	390,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	241	200	2,200,000,000	80	1,000,000,000	200	2,150,000,000	170	1,900,000,000	140	2,000,000,000	790	9,250,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.04.2.02.14	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	0	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	3	150,000,000	12	600,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	30,11	35,15	260,000,000	38,12	263,559,400	42,15	270,156,292	45,5	276,637,341	50	283,237,908	50	1,353,590,941	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.01	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara	100	100	110,000,000	100	163,559,400	100	120,156,292	100	126,637,341	100	103,237,908	100	623,590,941	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.01.01	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Dijangkau Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	50	50	30,000,000	50	50,000,000	50	40,156,292	20	30,000,000	20	30,000,000	190	180,156,292	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.01.02	Rujukan Anak-Anak Terlantar	Jumlah Anak-Anak Terlantar yang Mendapat Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	30	30	80,000,000	30	80,000,000	30	80,000,000	30	70,000,000	30	40,000,000	150	350,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.01.03	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah Anak Terlantar yang Terpantau dan Terpelihara Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	372	0	0	20	33,559,400	0	0	20	26,637,341	20	33,237,908	60	93,434,649	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	100	100	150,000,000	100	100,000,000	100	150,000,000	100	150,000,000	100	180,000,000	100	730,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02.01	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata (Orang)	15904	0	0	0	0	0	0	0	0	16119	100,000,000	16119	100,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.05.2.02.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Peningkatan Pendapatan Fakir Miskin Kabupaten/Kota (Keluarga)	16119	24837	150,000,000	24837	100,000,000	24837	150,000,000	24837	150,000,000	24837	80,000,000	124185	630,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02.03	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota (Keluarga)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		1.06.05.2.02.04	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	DINAS SOSIAL
		1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Warga Negara korban bencana kabupaten yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial	100	100	300,000,000	100	304,107,000	100	311,718,798	100	319,196,932	100	326,812,971	100	1,561,835,701	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100	100	200,000,000	100	204,107,000	100	200,000,000	100	209,196,932	100	216,812,971	100	1,030,116,903	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01.01	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	4781	80	100,000,000	50	100,000,000	30	60,000,000	45	100,000,000	45	100,000,000	250	460,000,000	DINAS SOSIAL

		1.06.06.2.01.02	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	150	30	50,000,000	30	50,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	30	40,000,000	150	220,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01.03	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota (Unit)	1	1	50,000,000	1	54,107,000	1	30,000,000	1	20,000,000	1	30,000,000	5	184,107,000	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01.04	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	32	0	0	0	0	30	30,000,000	30	30,000,000	30	30,000,000	90	90,000,000	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.01.05	Pelayanan Dukungan Psikososial	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	0	0	0	0	0	30	40,000,000	15	19,196,932	10	16,812,971	55	76,009,903	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana yang diselenggarakan	100	100	100,000,000	100	100,000,000	100	111,718,798	100	110,000,000	100	110,000,000	100	531,718,798	DINAS SOSIAL

		1.06.06.2.02.01	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana	Jumlah Kampung yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Kampung)	0	0	0	0	0	2	31,718,798	2	10,000,000	2	10,000,000	6	51,718,798	DINAS SOSIAL
		1.06.06.2.02.02	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota (Orang)	22	22	100,000,000	22	100,000,000	22	80,000,000	22	100,000,000	11	100,000,000	99	480,000,000	DINAS SOSIAL
Total							11,323,169,656	11,478,183,849	11,765,482,791	12,047,736,723	12,335,195,720	58,949,768,733						

Benteng, 28 Juli 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar

Hj. SATMAWATI, S.Sos., M.A.P
Pangkat: Pembina Tk. I
NIP. 19730217 199803 2 011

TABEL 6.3
PERUBAHAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN PENDANAAN BERDASARKAN KEPMENDAGRI 900.1.15.5-1317 TAHUN 2023
DINAS SOSIAL KAB.KEPULAUAN SELAYAR

Tujuan	Basaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bid. Urusan	Progrm	Kegiatan	Sub. Kegiatan				4	5	6	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target			Rp. (jt)	19	20
												9	10	11	12	13	14	15	16	17			18		
Meningkatnya Kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan dinas sosial						Nilai Sakip Dinas Sosial	C	C		C		B		BB		BB		BB							
						Laporan Keuangan Dinas Sosial sesuai SAP	100	100		100		100		100		100		100		100					
						Indeks kepuasan masyarakat	70,00	70,00		72,50		72,50		75,00		80,00		80,00		80,00					
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL																		
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																		
		06	01				Persentase Capaian Kinerja (%)		63.03				70.53		4.159.544.114		71.51		4.259.331.577		72.31		4.360.989.229		12.779.834.920
			01				Persentase Capaian Kinerja Keuangan (%)		83.00				88.00		91.00		95.00								
		06		2.01			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		100				100		185.000.000		100		220.000.000		100		250.000.000		655.000.000
		06	01	2.01	0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen	2 Dokumen				2 Dokumen	15.000.000	2 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	25.000.000	6 Dokumen	60.000.000					
		06	01	2.01	0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000					
		06	01	2.01	0003		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000					
		06	01	2.01	0004		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000					
		06	01	2.01	0005		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000					
		06	01	2.01	0006		Koordinasi dan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen	1 Laporan				1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000					
		06	01	2.01	0007		Evaluasi Kinerja perangkat Daerah	1 Dokumen	5 Dokumen				5 Dokumen	120.000.000	5 Dokumen	150.000.000	5 Dokumen	150.000.000	15 Dokumen	420.000.000					
		06	01	2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		100				100		2.377.122.919		100		2.388.122.919		100		2.402.122.919		7.167.368.757
		06	01	2.02	0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang	24 Orang				24 Orang	2.327.122.919	24 Orang	2.327.122.919	24 Orang	2.327.122.919	24 Orang	2.327.122.919	24 Dokumen	6.981.368.757			
		06	01	2.02	0002		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen							1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000					
		06	01	2.02	0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen							1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000	2 Dokumen	10.000.000					
		06	01	2.02	0004		Koordinasi dan Pelaksanaan akuntansi SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	10.000.000	3 Dokumen	25.000.000					
	06	01	2.02	0005		Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	4 Dokumen	1 Laporan				1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	11.000.000	1 Laporan	10.000.000		31.000.000						
	06	01	2.02	0006		Pengelolaan dan Penyediaan bahan tanggapan pemeriksaan	1 Dokumen	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000						

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi					
		Bd. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan				4	5	6	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target			Rp. (Rp)	19	20	21	22
												9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20		
																			BB								
		06	01	2.02	0007	Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	1 Dokumen	4 Laporan			4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	10.000.000	4 Laporan	15.000.000	12 Laporan	35.000.000								
		06	01	2.02	0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Progress Realisasi Anggaran	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	40.000.000								
		06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Laporan Barang Milik Daerah yang Terusun	100	100			100	30.000.000	100	20.000.000	100	45.000.000	2 Dokumen	95.000.000								
		06	01	2.03	0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan barang milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan barang milik daerah SKPD					1 Dokumen	10.000.000			1 Dokumen	10.000.000	2 Dokumen	20.000.000								
		06	01	2.03	0002	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah									1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000								
		06	01	2.03	0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah									1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000								
		06	01	2.03	0004	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD									1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	5.000.000								
		06	01	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan laporan barang milik daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000								
		06	01	2.03	0006	Penatausahaan barang milik daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD					1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000								
		06	01	2.03	0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD									1 Dokumen	5.000.000	1 Dokumen	5.000.000								
		06	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					100	80.000.000	100	110.000.000		150.000.000		340.000.000								
		06	01	2.05	0001	Peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		2 Unit			2 Unit	10.000.000	2 Unit	10.000.000	2 Unit	20.000.000	6 Unit	40.000.000								
		06	01	2.05	0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		1 Paket			1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	15.000.000	3 Paket	35.000.000								
		06	01	2.05	0003	Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Paket Pakaian Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai												0								
		06	01	2.05	0004	Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen				1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	10.000.000	1 Dokumen	15.000.000	3 Dokumen	35.000.000								
		06	01	2.05	0005	Monitoring, evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Kinerja Pegawai												0								
		06	01	2.05	0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang dipulangkan												0								
		06	01	2.05	0007	Pemulangan Pegawai yang Meninggal dalam Melaksanakan Tugas	Jumlah Laporan Hasil Pemulangan Pegawai yang meninggal dalam melaksanakan Tugas												0								
		06	01	2.05	0008	Pemindahan Tugas ASN	Jumlah ASN yang dipindahtugaskan												0								
		06	01	2.05	0009	Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang				5 Orang	50.000.000	11 Orang	80.000.000	11 Orang	100.000.000	27 Orang	230.000.000								
		01	2.05	0010		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan												0								
		01	2.05	0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan												0								

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)										Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
		Bid. Urusan	Progr am	Kegiatan	Sub. Kegiatan			Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Target	Rp. (jt)		
								Target	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target				
					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
																		BB			
		06	01	2.06		Administrasi umum perangkat daerah	Persentase Layanan Jasa Pemungjang yang tersedia	100	100			100	480.000.000	100	335.000.000	100	350.000.000		1.165.000.000		
		06	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan							1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000	2 Paket	10.000.000		
		06	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan									1 Paket	5.000.000	1 Paket	5.000.000		
		06	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan												0		
		06	01	2.06	0004	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	1 Paket	1 Paket			1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	20.000.000	3 Paket	40.000.000		
		06	01	2.06	0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 Paket	1 Paket			1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000		
		06	01	2.06	0006	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Paket bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	1 Paket	1 Tahun			1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	1 Paket	10.000.000	3 Paket	30.000.000		
		06	01	2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan												0		
		06	01	2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu												0		
		06	01	2.06	0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	450.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	300.000.000	3 Laporan	1.050.000.000		
		06	01	2.06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD												0		
		06	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD												0		
		06	01	2.07		Pengadaan Barang milik daerah pemungjang urusan pemerintah daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang diadakan	100	100			100	200.000.000	100	315.000.000	100	290.000.000		805.000.000		
		06	01	2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0003	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Tersedianya alat angkutan darat tak bermotor												0		
		06	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	16 Unit	11 Unit			7 Unit	40.000.000	11 Unit	50.000.000	11 Unit	50.000.000	29 Unit	140.000.000		
		06	01	2.07	0006	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	19 Unit	9 Unit			9 Unit	110.000.000	9 Unit	100.000.000	9 Unit	100.000.000	18 Unit	310.000.000		
		06	01	2.07	0007	Pengadaan Aset Lainnya	Jumlah Unit Aset Lainnya yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0009	Pengadaan gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan						0	1 Unit	125.000.000	1 Unit	100.000.000	2 Unit	225.000.000		
		06	01	2.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan												0		
		06	01	2.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	11 Unit	6 unit			8 unit	50.000.000	4 Unit	40.000.000	4 Unit	40.000.000	16 Unit	130.000.000		
		06	01	2.08		Peyediaan Jasa Pemungjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Jasa Pemungjang yang tersedia	100	100			100	567.421.195	100	601.208.658	100	603.836.310		1.772.466.163		
		06	01	2.08	0001	Peyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	3 Laporan	30.000.000		
		06	01	2.08	0002	Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Peyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	100.421.195	1 Laporan	120.208.658	1 Laporan	122.836.310	3 Laporan	343.466.163		

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bid. Urusan	Progr am	Kogla tan	Sub. Keagiatan				4	5	6	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target			Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)
												9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
																			BB						
		06	01	2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan							1 Laporan	10.000.000	1 Laporan	10.000.000	2 Lpaoran	20.000.000						
		06	01	2.08	0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan			1 Laporan	457.000.000	1 Laporan	461.000.000	1 Laporan	461.000.000	3 Lpaoran	1.379.000.000						
		06	01	2.09		Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang dipelihara	100	100			100	240.000.000	100	270.000.000	100	270.000.000		780.000.000						
		06	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya Pemeliharaan, dan pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan pajaknya												0						
		06	01	2.09	0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, paja, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit	37 Unit			37 Unit	120.000.000	37 Unit	110.000.000	37 Unit	150.000.000	111 Unit	380.000.000						
		06	01	2.09	0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												0						
		06	01	2.09	0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya												0						
		06	01	2.09	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan												0						
		06	01	2.09	0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	14 Unit	14 Unit			14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000	14 Unit	10.000.000	42 Unit	30.000.000						
		06	01	2.09	0007	Pemeliharaan aset tetap lainnya	jumlah aset tetap lainnya yang dipelihara	57 Unit	7 Unit			7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	7 Unit	10.000.000	21 Unit	30.000.000						
		06	01	2.09	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset tak berwujud yang dipelihara							4 Unit	10.000.000				10.000.000						
		06	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/Rehabilitasi	1 Unit	1 unit			1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	1 Unit	100.000.000	3 Unit	300.000.000						
		06	01	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi							1 Unit	20.000.000			1 Unit	20.000.000						
		06	01	2.09	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Rehabilitasi							1 Unit	10.000.000			1 Unit	10.000.000						
		06	01	2.09	0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi												0						
Meningkatkan Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial Masyarakat							Persentase Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PPKS)	65	65	70		70		80		80		80							
	Meningkatnya pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial						Persentase peningkatan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi PPKS	0	65	70		75		80		85		85							
							Persentase peningkatan kualitas SDM dan pelayanan PSKS	0	70	72,5		75,5		77,5		80		80							
		06	02			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan	18,99	32,67			42,40	368.867.245	44,81	377.716.370	50,00	386.728.682		1.133.312.297						

Tujuan	Gesaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir restra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bkd. Urusan	Progrm	Kegiatan	Sub. Kegiatan				4	5	6	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)	Target			Rp. (Rp)	Target	Rp. (Rp)
												9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
																			BB						
		06	02	2.01		Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Persentase KAT yang difasilitasi	n/a	100				100	53.867.245	100	82.716.370	100	46.728.682		183.312.297					
		06	02	2.01	0001	Fasilitasi Pemberdayaan Sosial KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang mendapatkan fasilitas pemberdayaan sosial kewenangan kabupaten/kota	349 Keluarga						10 Keluarga	52.716.370	10 Keluarga	46.728.682	20 Keluarga	99.445.052						
		06	02	2.01	0002	Peningkatan Kapasitas dan Pendampingan KAT	Jumlah Keluarga pada KAT yang meningkatkan Kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	n/a	10 Keluarga				10 Keluarga	53.867.245	10 Keluarga	30.000.000			83.867.245						
		06	02	2.02		Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sumbangan Daerah yang dikumpulkan						0		20.000.000		0		20.000.000						
		06	02	2.02	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang							1 Dokumen	20.000.000			1 Dokumen	20.000.000						
		06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan sosial	100	100				100	315.000.000	100	275.000.000	100	340.000.000		930.000.000					
		06	02	2.03	0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kowenangan Kabupaten/Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	30 Orang				20 Orang	50.000.000	20 Orang	40.000.000	20 Orang	60.000.000	60 Orang	150.000.000					
		06	02	2.03	0002	Peningkatan Kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kowenangan Kab/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan kabupaten/kota yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	11 Orang	11 Orang				11 Orang	60.000.000	11 Orang	60.000.000	11 Orang	60.000.000	11 Orang	180.000.000					
		06	02	2.03	0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Keluarga Kowenangan Kab/Kota	Jumlah Keluarga yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	4 Orang	10 Orang				10 Orang	50.000.000	10 Orang	55.000.000	10 Orang	50.000.000	30 Orang	155.000.000					
		06	02	2.03	0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kowenangan Kab/Kota	Jumlah lembaga kesejahteraan sosial yang meningkatkan kapasitasnya kewenangan kabupaten/kota	3 Karang Taruna	3 Lembaga				3 Lembaga	100.000.000	3 Lembaga	70.000.000	3 Lembaga	100.000.000	9 Lembaga	270.000.000					
		06	02	2.03	0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat yang dari hasil peningkatan sumber daya manusia dan lembaga konsultasi kesejahteraan keluarga (LK3) kewenangan kabupaten/kota	10 Orang	15 Orang				15 Sertifikat	55.000.000	15 Sertifikat	50.000.000	15 Sertifikat	70.000.000	45 Sertifikat	175.000.000					
		06	02	2.03		Pengembangan Potensi Sumber Daya Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase sumber kesejahteraan sosial yang mendapatkan bimbingan sosial												0						
		06	02	3.03	0006	Fasilitasi Pengembangan Potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota melalui pemberdayaan ekonomi	terlaksananya pemberdayaan Ekonomi bagi keluarga Miskin dan Rentan												0						
		06	02	3.03	0007	Pengelolaan Layanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan	Terlaksananya Pengelolaan layanan terpadu penanggulangan kemiskinan												0						
		06	02	3.03	0008	Pembinaan Teknis sumber daya manusia sumber kesejahteraan sosial daerah/kota													0						
		06	02	3.04		Pendataan SDM Kesejahteraan Sosial	Persentase SDM kesejahteraan Sosial yang di data												0						
		06	02	3.04	0001	Pendataan, verifikasi, dan validasi sertifikat Sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pendataan, verifikasi, dan validasi sertifikat sumber daya kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota												0						
		06	02	3.05		Pendataan lembaga kesejahteraan sosial daerah	Persentase lembaga kesejahteraan Sosial yang di data												0						
		06	02	3.05	0001	Pendataan, verifikasi, dan validasi lembaga kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	Terlaksananya Pendataan, verifikasi, dan validasi lembaga kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota												0						

Tajuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi			
		Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub. Kegiatan				4	5	6	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target			Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)
												9	10	11	12	13	14	15	16	17			18	19	20
																			BB						
		06	03			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Warga Migran yang dipulangkan													0					
		06	03	2.01		Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik dekarbasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik dekarbasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal													0					
		06	03	2.01	0001	fasilitasi Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik Dekarbasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Terfasilitasi Pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik Dekarbasi di daerah kabupaten/kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal kewenangan kabupaten/kota													0					
		06	03	3.02		Layanan Psikososial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri	Persentase korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri yang mendapatkan layanan psikososial													0					
		06	03	3.01	0001	Penyediaan layanan psikososial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri	tersedianya layanan psikososial terhadap korban tindak kekerasan dalam dan luar negeri													0					
		06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase warga negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	18.99	100			100	6.634.415.089	100	6.793.374.707	100	6.955.669.399		20.383.659.195						
							Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	31.99	100			100		100		100				0					
							Persentase warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi diluar panti	17.35	100			100		100		100				0					
							Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	25.00	100			100		100		100				0					
							Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	17.36	18.36			100		100		100				0					
		06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	89.1			89.1	2.714.415.089	89.1	3.073.574.707	89.1	2.975.669.399		8.763.659.195						
		06	04	2.01	0001	Penyandang Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan kabupaten/kota	1.010 Orang	600 Orang			500 Orang	2.100.000.000	600 Orang	2.360.000.000	600 Orang	2.360.000.000		1700 Orang	6.820.000.000					
		06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan kabupaten/kota	1.010 Orang	130 Orang			130 Orang	180.000.000	150 Orang	210.000.000	100 Orang	150.000.000		430 Orang	540.000.000					
		06	04	2.01	0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	22 Orang	100 Orang			100 Orang	130.000.000	120 Orang	150.000.000	120 Orang	150.000.000		340 Orang	430.000.000					
		06	04	2.01	0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi dan Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota					5 Orang	7.000.000	5 Orang	10.000.000				10 Orang	17.000.000					

Tujuan	Besaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Besaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)										Kondisi kinerja pada akhir retribusi perangkat daerah		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
		Bid. Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			6	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		19			20
									Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)				
9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22									
					4	5	6	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
																		BB				
		06	04	2.01	0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota					5 Orang	7.415.089	5 Orang	10.000.000			5 Orang	17.415.089			
		06	04	2.01	0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang			30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	30 Orang	150.000.000	90 Orang	450.000.000			
		06	04	2.01	0007	Facilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak bagi penyandang disabilitas kewenangan					5 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	25 Orang	25.000.000			
		06	04	2.01	0008	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota					5 Orang	5.000.000	10 Orang	10.000.000	10 Orang	10.000.000	25 Orang	25.000.000			
		06	04	2.01	0009	Pemberian Layanan Data Dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota					5 Orang	5.000.000	5 Orang	10.000.000	5 Orang	10.000.000	15 Orang	25.000.000			
		06	04	2.01	0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	jumlah orang yang mendapatkan Layanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	20 Orang	30 orang			30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	30 orang	50.000.000	90 Orang	150.000.000			
		06	04	2.01	0011	Pemberian pelayanan Penelusuran Keluarga	jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota					5 Orang	5.000.000	5 Orang	13.574.707	5 Orang	15.669.399	15 Orang	34.244.106			
		06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	5 Orang	10 Orang			10 Orang	70.000.000	10 Orang	90.000.000	10 Orang	70.000.000	30 Orang	230.000.000			
		06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan NAPZA di luar Panti Sosial	Persentase Pemerta Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPRS lainnya) bukan korban HIV/aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100	11.9%			11.9%	3.920.000.000	11.9%	3.720.000.000	11.9%	3.980.000.000		11.620.000.000			
		06	04	2.02	0001	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan kabupaten/kota	12579 KPM	12597 Orang			10558 Orang	150.000.000	10558 Orang	100.000.000	10558 Orang	100.000.000	10558 Orang	350.000.000			
			04	2.02	0002	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah Orang yang mendapatkan Pelayanan Kedaruratan kewenangan kabupaten/kota					0	20 Orang	10.000.000	20 Orang	10.000.000	40 Orang	20.000.000				
		06	04	2.02	0003	Penyediaan Permaknaan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permaknaan sesuai dengan standar gisi minimal kewenangan kabupaten/kota	1215 KK	600 Orang			900 Orang	800.000.000	900 Orang	800.000.000	900 Orang	1.000.000.000	2700 Orang	2.600.000.000			
		06	04	2.02	0004	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima paksaan dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan kabupaten/kota					0						0				
		06	04	2.02	0005	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan kabupaten/kota	100 KK	300 Orang			200 Orang	500.000.000	200 Orang	500.000.000	200 Orang	500.000.000	600 Orang	1.500.000.000			
			04	2.02	0006	Penyediaan perbekalan kesehatan di luar panti	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan perbekalan kesehatan di luar panti kewenangan kabupaten/kota					0						0				
			04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan kabupaten/kota	1 Kali				0	10 Orang	20.000.000	20 Orang	30.000.000	30 Orang	50.000.000				
			04	2.02	0008	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA	jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/Aids dan NAPZA					0						0				
			04	2.02	0009	Facilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak	Jumlah orang yang membutuhkan pembuatan nomor induk kependudukan, kartu tanda penduduk, akta kelahiran, surat nikah, dan/atau identitas anak bagi penyandang masalah	1 Tahun				0	10 Orang	20.000.000	15 Orang	20.000.000	25 Orang	40.000.000				
			04	2.02	0010	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	100 KK	100 Orang			100 Orang	100.000.000	100 Orang	150.000.000	100 Orang	100.000.000	300 Orang	350.000.000			

Tujuan	Sasaran	Kode				Program / Kegiatan	Indikator Kinerja, Sasaran Program (Outcome) dan Kegiatan (Output)	Data Capaian pada awal perencanaan (2020)	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		2026		Kondisi kinerja pada akhir renstra perangkat daerah	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi							
		Bid. Urusan	Pro gram	Kegiatan	Sub-kegiatan				4	5	6	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	Target				Rp. (jt)	Target	Rp. (jt)	19	20	21	22
												9	10	11	12	13	14	15				16	17	18				
																		BB										
			04	2.02	0011	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota														0							
			06	04	2.02	0012	Pemberian Layanan dan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan kabupaten/kota	27 KK	27 Orang			15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000	15 Orang	70.000.000	45 Orang	210.000.000								
			06	04	2.02	0013	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	241 KK	200 Orang			200 Orang	2.150.000.000	170 Orang	1.900.000.000	140 Orang	2.000.000.000	510 Orang	6.050.000.000								
			06	04	2.02	0014	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota					3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	3 Dokumen	150.000.000	6 Dokumen	450.000.000								
			06	05			PROGRAM PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	30.11	35.15			42.15	270.156.292	45.5	276.637.341	50.0	283.237.908			830.031.541							
			06	05	2.01		Pemeliharaan Anak Terlantar	Persentase anak terlantar yang dipelihara						120.156.292	126.637.341		103.237.908				350.031.541							
			06	05	2.01	0001	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang dijangkau kewenangan kabupaten/kota	50 Orang	50 Orang			30 Orang	40.156.292	20 Orang	30.000.000	20 Orang	30.000.000	70 Orang	100.156.292								
			06	05	2.01	0002	Rujukan Anak- Anak Terlantar	Jumlah anak-anak terlantar yang mendapat rujukan kewenangan kabupaten/kota	30 Orang	30 Orang			30 Orang	80.000.000	30 Orang	70.000.000	30 Orang	40.000.000	90 Orang	190.000.000								
			06	05	2.01	0003	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	Jumlah anak terlantar yang terpantau dan terpeliharaan kewenangan kabupaten/kota	372 Anak						20 Orang	26.637.341	20 Orang	33.237.908	40 Orang	59.875.249								
			06	05	2.01		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	36					150.000.000		150.000.000		180.000.000			480.000.000							
			06	05	2.02	0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kab/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota yang didata	15904 Keluarga								16.119 Keluarga	100.000.000	16.119 Keluarga	100.000.000								
			06	05	2.02	0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin kabupaten/kota	16.119 Keluarga	24837 Keluarga			24837 Keluarga	150.000.000	24837 Keluarga	150.000.000	24837 Keluarga	80.000.000	24837 Orang	380.000.000								
			06	05	2.02	0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan	900 KK												0							
			06	05	2.02	0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan													0							
			06	05	3.03		Penetapan Kebijakan dan program, serta Skema perlindungan sosial dengan mengutamakan dan mengikutsertakan OAP														0							
			06	05	3.03	0001	Penetapan kebijakan program dan skema perlindungan sosial														0							
			06	06			PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat bencana	100%	100%			100%	311.718.798	100%	319.196.932	100%	326.812.971			957.728.701							
			06	06	2.01		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Dan Sosial Kabupaten/ Kota	Persentase perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kewenangan kabupaten/kota	100%	100%			100%	200.000.000	100%	209.196.932	100%	216.812.971			626.009.903							
			06	06	2.01	0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanaan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan kabupaten/kota	60 KK Korban Bencana dan 4721 KK Dampak Covid-19	80 Orang			30 Orang	60.000.000	45 Orang	100.000.000	45 Orang	100.000.000	120 Orang	260.000.000								

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja daerah adalah alat ukur spesifikasi untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD dapat dicapai.

Penetapan indikator dan asumsi pembangunan daerah tahun 2021-2026 berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2005-2025, dan visi misi kepala daerah terpilih periode 2021-2026.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan bidang urusan sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar dapat dilihat pada tabel 7.1 dan tabel 7.2 berikut :

Tabel 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja Awal	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi kinerja akhir
			Tahun				
		Tahun 2020	2022	2023	2024	2025	Tahun 2026
1	2	3	5	6	7	8	9
1	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan yang diberdayakan	18,66%	25,92%	30,55%	36,00%	42,43%	50,00%
2	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	16,36%	19,56%	23,39%	27,97%	33,45%	40%
3	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS lainnya) bukan korban HIV/aids dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	17,36%	18,36%	21,32%	24,54%	25,92%	28,22%
3	Persentase PPKS dari Data PPKS yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada assat dan setelah tanggap darurat bencana (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Jumlah taman makam pahlawan yang dikelola	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit

Tabel 7.2
Indikator SPM Bidang Sosial

No	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator/Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	Kondisi Awal RPJMD (2020)	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi akhir RPJMD 2026
				2021	2022	2023	2024	2025	2016
1	2		3	4	5	6	7	8	9
1	Program Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti	%	18,99	100	100	100	100	100	100
2	Persentase anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	31,99	100	100	100	100	100	100
3	Persentase penduduk lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	17,35	100	100	100	100	100	100
4	Persentase penduduk/ gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti	%	25	100	100	100	100	100	100
5	Persentase penduduk korban bencana yang memperoleh perlindungan	%	100	100	100	100	100	100	100

Tabel 7.3
Penetapan Indikator TBP/SDGS

Kode Indikator	Indikator	Satuan	Baseline					
			2020	2022	2023	2024	2025	2026
1.3.1.(c)	Persentase Penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasar dan inklusivitas	%	19	20	22	23	24	25
1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan	KPM	6.597	6.600	6.650	6.700	6.700	6.700

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Penjabaran Renstra ini lebih lanjut akan diuraikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar pada setiap tahun selama 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 diharapkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang kedalam RPJMD Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026.

Pelaksanaan Renstra Dinas Sosial 2021 – 2026 akan menjadi tanggung jawab langsung Kepala Dinas Sosial. Sehingga setiap target yang akan dicapai perlu dipertimbangkan menyesuaikan dengan target RPJMD serta pagu indikatif yang ditetapkan. Sementara itu, pelaksanaan evaluasi dan pemantauan atas pelaksanaan Renstra Dinas Sosial akan dilakukan bersama oleh Kepala Dinas Sosial dan tim dari Bappelitbangda Kabupaten Kepulauan Selayar.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra Dinas sosial ini juga akan lebih ditentukan melalui keterlibatan *Stakeholder* pembangunan yaitu Pemerintah, Lembaga/Kementrian, dan masyarakat. Sehingga diharapkan program kegiatan yang direncanakan merupakan program kegiatan yang melibatkan semua pihak.

Benteng, 1 Agustus 2023
Kepala Dinas Sosial
Kabupaten Kepulauan Selayar



Hj.SATMAWATI, S.Sos., M.A.P

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip. 19730217 199803 2 011